

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EFEKTIVITAS ELEKTRONIK WARONG KELOMPOK USAHA BERSAMA
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (E-WARONG KUBE PKH) OLEH
DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU TAHUN 2018**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



**DIAN INDAH SARI
NPM. 157310563**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang tidak terhingga penulis ucapkan, atas segala rahmad dan nikmat yang diberikannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul “Efektifitas Elektronik Warong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (E-Warong Kube PKH) Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru 2018”. Ini penulis tulis dengan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian Skripsi.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman ilmu serta pengalaman pribadi sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk memenuhi hal ini penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari bahwasanya dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini banyak pihak turut membantu, sehubungan dengan itu secara khusus penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,MCL selaku Rektor UIR yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.
2. Bapak Dr.Syahrul Akmal Latif, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan saran beserta kritik sedari sedari awal pemulaan Skripsi ini sehingga sampai pada Skripsi yang layak di ujian Komprehensif.
4. Bapak Andriyus S.Sos.,M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan menyediakan waktu dan membagi serta menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung sehingga Skripsi penulis layak untuk ujian.
5. Ibunda tercinta sebagai idola dan motivator terbaik yang telah memberikan doa dan segalanya kepada penulis baik yang berbentuk moril maupun materil.
6. Untuk teman teman saya yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu saya selama perkuliahan.

Penulis memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau yang berperan dalam penyelesaian Skripsi ini selalu diberikan rahmat dan karunia yang setimpal dengan apa yang telah beliau berikan kepada penulis semasa perkuliahan di Universitas Islam Riau serta untuk rekan-rekan seperjuangan semoga kita sama-sama menemukan masa depan yang sesuai dengan apa yang telah kita perjuangkan. Akhir kata penulis hanya bisa mendoakan semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho kepada kita semua. Aamiin.

Pekanbaru, 24 Juli 2020

Dian Indah Sari

DAFTAR ISI

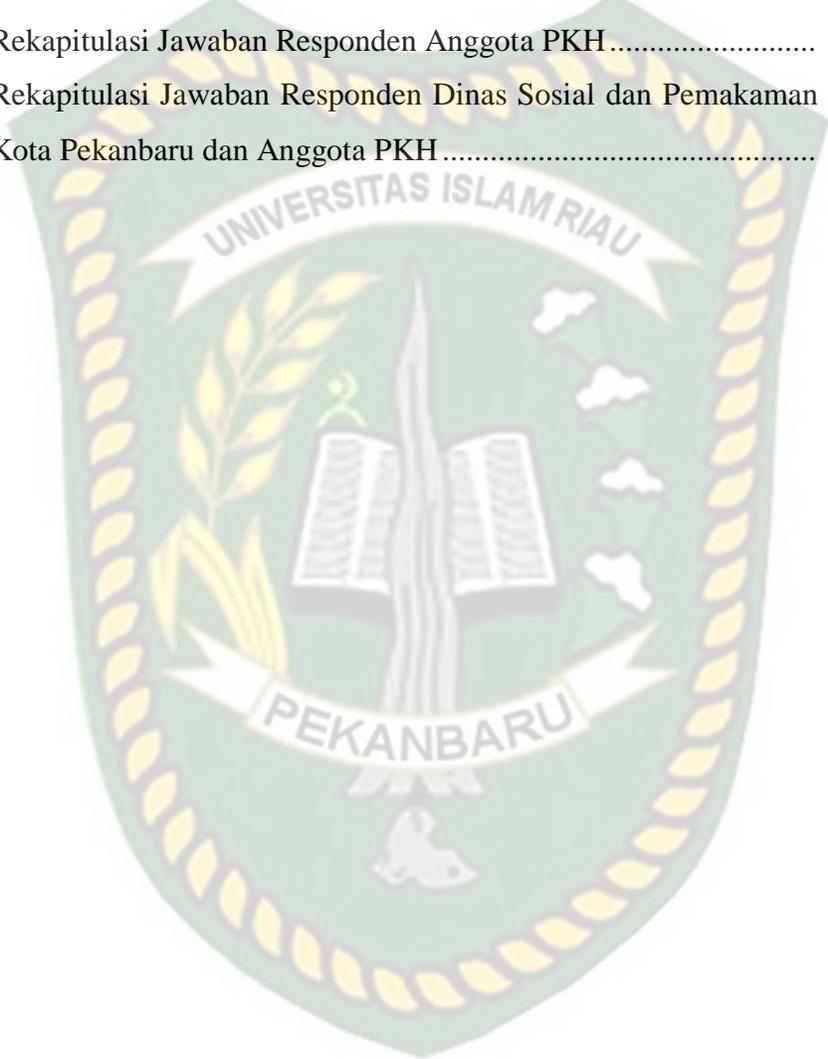
	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
SURAT PERNYATAAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan	18
1. Konsep Ilmu Pemerintahan dan Pemerintah.....	18
2. Konsep Asas penyelenggara Pemerintah	21
3. Fungsi Pemerintahan.....	23
4. Konsep Kebijakan Publik	25
5. Konsep Program Keluarga Harapan	28
6. Bantuan Pangan Non-Tunai	29
7. E-Warong KUBE PKH	31
8. Konsep E-Goverment.....	33
9. Tujuan dan sasaran E-Goverment.....	35
10. Konsep Efektifitas.....	36
B. Penelitian Terdahulu	42
C. Kerangka Pikir	43
D. Konsep Operasional.....	44
E. Operasionalisasi Variabel.....	46
F. Teknik Pengukuran.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	50
B. Lokasi Penelitian.....	51

C. Populasi dan Sampel.....	51
D. Teknik Penarikan Sampel.....	52
E. Jenis dan Sumber Data.....	52
F. Teknik Pengumpulan Data.....	53
G. Teknik Analisis Data.....	55
H. Jadwal Penelitian.....	55
I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian.....	56
BAB IV DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru.....	58
B. Kondisi Geografis.....	59
C. Deskripsi umum Dinas Sosial dan pemakaman Kota Pekanbaru.....	60
1. Sejarah Singkat Dinas Sosial Kota Pekanbaru.....	60
2. Visi dan Misi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.....	61
3. Tugas Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.....	62
4. Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.....	63
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responden.....	69
1. Jenis Kelamin.....	70
2. Umur.....	70
B. Hasil dan Pembahasan.....	71
1. Ketepatan Sasaran program.....	71
2. Sosialisasi Program.....	74
3. Tujuan Program.....	77
4. Pemantauan Program.....	80
C. Faktor Penghambat.....	85
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Program Komplementer PKH	7
I.2 Program Keluarga Harapan dan yang tidak program keluarga harapan di Kota Pekanbaru tahun 2017	13
I.3 Daftar E-Warong aktif di Kota Pekanbaru	14
I.4 Daftar E-Warong yang Belum aktif di Kota Pekanbaru	15
II.1 Penelitian Terdahulu	28
II. 2 Operasional Variabel	46
III.1 Keadaan Populasi dan Sampel	51
III.2 Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian	55
V.1 Distribusi Jenis Kelamin Pegawai Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru	70
V.2 Distribusi Umur Pegawai Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru	70
V.3 Distribusi Jawaban responden Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru terhadap indikator Ketepatan Sasaran Program ..	73
V.4 Distribusi Jawaban Responden anggota PKH terhadap indikator Ketepatan Sasaran Program	74
V.5 Distribusi Jawaban Responden Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Terhadap Indikator Sosialisasi Program	75
V.6 Distribusi Jawaban Responden Anggota PKH terhadap Indikator Sosialisasi Program	76
V7. Distribusi Jawaban Responden Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru terhadap indikator Tujuan Program	78
V.8 Distribusi Jawaban Responden Anggota PKH terhadap indikator Tujuan Program	79
V.9 Distribusi Jawaban Responden Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru terhadap indikator Pemantauan Program	80

V.10 Distribusi Jawaban Responden Anggota PKH terhadap Indikator Pemantauan Program.....	81
V.11 Rekapitulasi Jawaban Responden Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.....	83
V.12 Rekapitulasi Jawaban Responden Anggota PKH.....	84
V.13 Rekapitulasi Jawaban Responden Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dan Anggota PKH.....	85



DAFTAR GAMBAR

Tabel	Halaman
I.I Mekanisme Program E-Warong	12
II.2 Kerangka Pikir	44



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	Qusioner Penelitian 92
Lampiran 2	Wawancara Penelitian 101
Lampiran 3	Surat Keputusan Dekan FISIPOL UIR tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa 104
Lampiran 4	Surat Rekomendasi Dari Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau 105
Lampiran 5	Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru..... 106
Lampiran 6	Surat Keterangan Dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru telah melakukan Penelitian 107
Lampiran 7	Dokumentasi Penelitian..... 108

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Komprehensif Yang BertandaTangan dibawah ini :

Nama : Dian Indah Sari
Npm : 157310563
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
JenjangPendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Efektifitas Elektronik Warong Kelompok Usaha Bersma Program Keluarga Harapan (E-Warong KUBE PKH) oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru tahun 2018

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah – kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekatnya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang di tetap kan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian koprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan fakultas dan universitas serta hukum Negara republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buatdengan penuh kesadaran dan tanpat tekanan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, 24 Juli 2020



Pernyataan

Dian Indah Sari

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Komprehensif Yang BertandaTangan dibawah ini :

Nama : Dian Indah Sari
Npm : 157310563
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
JenjangPendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Efektifitas Elektronik Warong Kelompok Usaha Bersma Program Keluarga Harapan (E-Warong KUBE PKH) oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru tahun 2018

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah – kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekatnya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang di tetap kan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian kprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan fakultas dan universitas serta hukum Negara republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buatdengan penuh kesadaran dan tanpat tekanan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, 24 Juli 2020
Pernyataan

Dian Indah Sari

**EFEKTIFITAS ELEKTRONIK WARONG KELOMPOK USAHA
BERSAMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (E-WARONG KUBE
PKH) OLEH DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU TAHUN 2018**

ABSTRAK

Dian Indah Sari

Kata Kunci : Efektifitas, E-Warong Kube PKH

Tujuan Penelitian ini untuk mendeskripsikan Efektifitas Elektronik warong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (E-Warong KUBE PKH) oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru tahun 2018. Adapun Metode yang di gunakan dalam Penelitian ini adalah Metode Kuantitatif dengan Teknik Analisis Deskriptif, Penulisan ini Menggambarkan kondisi secara objek yang di temukan di lapangan berdasarkan data data yang berkaitan dengan Pelaksanaan E-Warong KUBE PKH ini tepatnya berkaitan dengan masalah jumlah barang yang di ambil itu berkurang dan sarana yang kurang memadai, Dengan Kuisisioner dan Wawancara serta Observasi sebagai alat Pengumpulan data, dan Data yang di kumpulkan kemudian di sajikan sebagai bahan baku untuk menganalisis kondisi Empiris dan Objektifitas keberadaan dan tujuan penelitian pada lokasi yang di teliti. Terdapat 4 kelompok Populasi dan Sampel dalam penelitian ini. Dan jenis serta Teknik Pengumpulan Data yang digunakan terdiri dari Data Primer dan Data Sekunder yang diperoleh dengan alat bantu tabel Frekuensi sesuai dengan hasil pengamatan yang penulis lakukan maka dapat di tarik kesimpulan bahwa pelaksanaan penelitian ini masih masuk dalam Kategori Cukup Baik , Dimana dalam Penelitian ini terkait dengan Efektifitas program E-Warong ini masih banyak masalah khususnya terkait dengan sarana yang kurang memadai dan juga kurangnya pemantauan dari pihak dinas terhadap program yang di jalankan .

**ELECTRONIC EFFECTIVENESS OF BUSINESS GROUP WARONG
WITH HOPE FAMILY PROGRAMS (E-WARONG KUBE PKH) BY
SOCIAL DEPARTMENT OF PEKANBARU CITY IN 2018**

ABSTRACT

Dian Indah Sari

Keywords: Effectiveness, E-Warong Kube PKH

The purpose of this research is to describe the effectiveness of Electronic stalls of the Joint Business Group Hope Family Program (E-Warong KUBE PKH) by the Pekanbaru City Social Service in 2018. The method used in this research is the Quantitative Method with Descriptive Analysis Techniques, this writing illustrates the conditions in terms of the object found in the field based on data related to the implementation of PKH KUBE E-Warong is precisely related to the problem of the number of items being taken is reduced and inadequate facilities, with questionnaires and interviews and observation as a data collection tool, and data collected collected and then presented as raw material for analyzing the conditions of the Empirical and Objective of the existence and purpose of the study at the location in question. There are 4 population groups and samples in this study. And the type and Data Collection Techniques used consist of Primary Data and Secondary Data obtained with the tools of the Frequency table in accordance with the observations made by the author, it can be concluded that the implementation of this research is still in the Fairly Good Category, Which in this Research is related With the effectiveness of the E-Warong program there are still many problems, especially related to inadequate facilities and also the lack of monitoring from the department of the program being run.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berisi mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan menyatakan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhususan serta potensi keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan pemerintahan menurut Pasal 9 terbagi atas urusan pemerintahan *absolut*, urusan pemerintahan *konkruen* dan urusan pemerintahan umum. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu: Urusan pemerintahan *absolute* adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat, antara lain:

- a. politik luar negeri
- b. pertahanan;
- c. keamanan

- d. yustisi;
- e. moneter dan fiskal nasional; dan
- f. agama

Sedangkan urusan pemerintahan *konkruen* merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara urusan pemerintahan pusat, urusan pemerintahan daerah provinsi dan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi: Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Dan dialam ayat (2) yang berbunyi: Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;

- e. lingkunganhidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Salah satu tujuan utama didirikannya sebuah negara adalah untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Akan tetapi berbagai macam fenomena dalam kehidupan bernegara terkadang belum mampu melepaskan sebuah negara termasuk Indonesia dari mata rantai kemiskinan.

Kota Pekanbaru sebagai salah satu daerah yang ada di Provinsi Riau yang menyandang predikat sebagai Ibu Kota Provinsi Riau, dan memiliki penduduk berjumlah 1.091.008 jiwa (*Sumber Kantor Badan Statistik Kota Pekanbaru Tahun 2018/9*), dalam upaya mempermudah pelayanan kepada masyarakat maka Kota

Pekanbaru membagi menjadi 12 Kecamatan yang di pimpin oleh masing-masing camat , Kota Pekanbaru dengan Penduduk yang banyak dengan mobilitas yang tinggi dalam hal ini tidak bisa pungkiri juga masih banyak masyarakat yang masih masuk dalam kategori Kurang mampu. Menurut Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pekanbaru (2016:3). Saat ini kemiskinan bukan hanya permasalahan ekonomi semata, tetapi merupakan hasil akhir interelasi faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Disamping problem klasik mengenai kekurangan kebutuhan dasar, dimensi kemiskinan juga mencakup problem ketidakberdayaan dan keterlibatan masyarakat luas dalam proses pengambilan keputusan, serta problem kerentanan dan kerawanan terhadap resiko-resiko diluar dirinya.

Sejak 2007 Pemerintah Indonesia melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kelompok masyarakat termiskin. Program ini merupakan Program bantuan tunai bersyarat. Tujuannya antara lain adalah:

- a. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan,
- b. meningkatkan taraf pendidikan anak KPM (keluarga penerima manfaat)-PKH,
- c. meningkatkan taraf kesehatan ibu hamil/menyusui dan anak di bawah usia 6 tahun, dan
- d. meningkatkan kondisi ekonomi KPM. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019, pemerintah memperluas sasaran PKH dan secara bertahap menyalurkan bantuan secara nontunai. Target PKH bukan saja keluarga miskin yang mempunyai komponen

kesehatan dan pendidikan, melainkan juga keluarga dengan komponen disabilitas berat dan lanjut usia.

Pada April 2016, Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada jajaran menterinya, arahan tersebut berupa:

- a. Pentingnya mewujudkan sistem finansial nasional yang inklusif;
- b. Penyaluran semua bantuan sosial (bansos) dan subsidi secara nontunai dengan menggunakan sistem perbankan untuk memudahkan kontrol dan pemantauan, serta mengurangi penyimpangan; dan
- c. Perlunya mengintegrasikan penggunaan beragam kartu dalam menyalurkan dana bansos menjadi satu kartu. Terkait hal ini, Mensos (Menteri Sosial) memberikan arahan kepada jajaran di lingkup Kemensos bahwa:
 - a) semua Program penanganan kemiskinan perlu disinergikan agar outcome (keluaran)-nya memberikan dampak luas, efisien, dan efektif;
 - b) perlu dilakukan pemberdayaan pendamping PKH dan masyarakat yang menjadi dampingannya, dan menjadikan mereka sebagai pelaku dalam sistem keuangan inklusif; dan
 - c) proses penanganan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) harus holistik, mulai dari pembentukan, pengorganisasian, sampai pada pemasaran hasil usahanya.

Atas dasar berbagai hal tersebut, mulai Juni 2016 Kemensos menguji cobakan bansos nontunai dengan menganut prinsip:

- a. Semua penerima bantuan akan memiliki rekening tabungan bank,

- b. Semua bansos (tunai dan e-voucher) akan masuk ke dalam rekening tersebut,
- c. Pencairan bantuan dilakukan melalui agen/outlet (toko), dan
- d. pencairan bantuan oleh KPM dilakukan dengan menggunakan teknologi digital. Secara operasional, penyaluran bansos secara nontunai diwujudkan dalam bentuk Program Elektronik Warong Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (e-Warong KUBE -PKH, untuk selanjutnya dalam laporan ini disebut sebagai e-Warong).

Menurut Mensos, Program e-Warong memiliki beberapa Fungsi sekaligus:

- a. Program e-Warong memberdayakan masyarakat kurang mampu supaya lebih sejahtera sehingga dapat membantu menurunkan angka kemiskinan;
- b. Program e-Warong meningkatkan akses keluarga miskin ke pelayanan keuangan inklusif dan menghilangkan penyalahgunaan bantuan;
- c. Program e-Warong merupakan bagian dari upaya membangkitkan kembali semangat gotong royong dalam upaya pengentasan masyarakat miskin;
- d. penerima bansos bisa menerima bantuan sesuai dengan jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran, serta secara bertahap bansos bisa diintegrasikan dalam format nontunai. Harga sembako di e-Warong kemungkinan lebih rendah daripada harga pasar karena pasokan barangnya langsung dari distributor. KPM dapat mencairkan bantuannya kapan saja dibutuhkan dan tidak perlu mengantri lagi.

- e. e-Warong sekaligus berfungsi sebagai agen bank sehingga pembinaan keluarga miskin tidak lagi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga melibatkan dunia usaha.

Berikut ini Program Keluarga Harapan (PKH) yang pernah dijalankan di Indonesia antara lain adalah:

Tabel 1. I Program Komplementer PKH

No	Nama Program PKH	Jumlah
1	ASPDB(Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat)	50.000 Jiwa
2	PIP (Program Indonesia Pintar)	17,5 Juta Jiwa
3	PJS (Program Indonesia Sehat)	92,4 Juta Jiwa
4	BPNT(Bantuan Pangan Non Tunai)	1,4-10 Juta Jiwa
5	RASTRA(Program Bantuan Beras Sejahtera)	14,3 Juta Jiwa
6	Subsidi LPG	26 Juta RT 2,3 Juta UMK
7	Subsidi PLN	19,1 Juta RT/450 VA 4,1 Juta RT/900 VA
8	ASLUT(Sistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar)	150.000 Jiwa

Sumber: Kementerian Keuangan RI Jakarta, 22 November 2017

Untuk menjadi Anggota KUBE Jasa diatur didalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warong Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan yaitu terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. Peserta PKH, memiliki kartu keluarga sejahtera, dan/atau penerima manfaat Bantuan Sosial lainnya;
- b. Berdomisili tetap dan memiliki identitas diri;

- c. Telah menikah dan/atau berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dan masih produktif; dan
- d. Memiliki potensi dan keterampilan.

Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (1) mengatur tentang Anggota KUBE jasa dapat berakhir apabila:

- a. Telah meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Pindah ke kecamatan lain;
- d. Sakit permanen; atau
- e. Melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sedangkan ukuran dasar atau kriteria dalam pembentukan E-Warong KUBE PKH Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warong Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan yakni:

- a. Tempat untuk mendirikan E-Warong KUBE PKH harus bertempat di rumah salah satu pengurus KUBE Jasa atau tempat lain berdasarkan kesepakatan anggota KUBE Jasa.
- b. Lokasi terkoneksi jaringan internet dan jaringan listrik.
- c. Melayani 500 (lima ratus) sampai dengan 1000 (seribu) penerima manfaat yang berasal dari anggota KUBE peserta PKH dan penerima beras untuk

rakyat sejahtera yang berasal dari 1 (satu) Kecamatan atau lebih dalam 1 (satu) Kabupaten.

- d. Menggunakan rumah pengurus atau anggota KUBE Jasa.
- e. Pengurus atau anggota yang rumahnya menjadi tempat usaha E-Warong KUBE PKH tidak meminta sewa dan juga menandatangani surat pernyataan dengan bermaterai cukup atas kesediaan penggunaan rumah untuk E-Warong KUBE PKH.
- f. Melaksanakan transaksi bantuan sosial non tunai.
- g. Aksesibilitas jalan yang memadai.

Terkait dengan sumber pendanaan e-Warong KUBE PKH diatur dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warong Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan yakni:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Dana hibah langsung dalam negeri; dan/ atau
4. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Agenda Nasional Riau Nomor 592/IX/2004 dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan di Provinsi Riau tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS/132/III/2005 Tanggal 31 Maret 2005 mengeluarkan kebijakan untuk pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) yang dituangkan secara jelas dalam pedoman umum dan petunjuk teknis serta menunjuk lokasi penerima bantuan

dana usaha Desa/Kelurahan. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mengadakan proses pembangunan yang partisipatif dan gotong royong.

Adapun Fungsi e-Warong KUBE PKH terdapat didalam Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warong Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan antara lain adalah :

- a. Tempat menjual bahan pangan murah berkualitas dan kebutuhan pokok rumah tangga;
- b. Agen bank penyalur bantuan sosial nontunai;
- c. Tempat pemasaran hasil produksi KUBE ;

Dengan kata lain tujuan dari Program e-Warong KUBE PKH tersebut hadir untuk membantu mengentaskan kemiskinan disetiap daerah dengan memberdayakan masyarakat yang kurang mampu agar lebih sejahtera, serta meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin. Sehubungan dengan tujuan tersebut diharapkan Program e-Warong KUBE PKH dapat mempermudah masyarakat dalam menyalurkan bantuan-bantuan sosial tidak lagi dengan menggunakan uang tunai, melainkan dengan menggunakan sistem perbankan yang dapat mendukung perilaku produktif bagi penerima bantuan. Serta diharapkan juga terciptanya transparansi dan akuntabilitas untuk mengurangi penyimpangan, dan ekonomi masyarakat yang menjalankan Program e-Warong KUBE PKH tersebut dapat meningkat dikarenakan masyarakatlah sebagai pelaku dari Program tersebut.

Menurut Mensos, Program e-Warong memiliki fungsi antara lain :

1. Program e-Warong memberdayakan masyarakat kurang mampu supaya lebih sejahtera sehingga dapat membantu menurunkan angka kemiskinan;
2. Program e-Warong meningkatkan akses keluarga miskin ke pelayanan keuangan inklusif dan menghilangkan penyalahgunaan bantuan;
3. Program e-Warong merupakan bagian dari upaya membangkitkan kembali semangat gotong royong dalam upaya pengentasan masyarakat miskin;
4. Penerima bansos bisa menerima bantuan sesuai dengan jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran, serta secara bertahap bansos bisa diintegrasikan dalam format nontunai. Harga sembako di e-Warong kemungkinan lebih rendah daripada harga pasar karena pasokan barangnya langsung dari distributor. KPM dapat mencairkan bantuannya kapan saja dibutuhkan dan tidak perlu mengantri lagi.
5. E-Warong sekaligus berfungsi sebagai agen bank sehingga pembinaan keluarga miskin tidak lagi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga melibatkan dunia usaha.

Sistem penyaluran bansos secara non tunai ini terintegrasi di sistem digital perbankan sehingga pemegang kartu bisa memanfaatkan jaringan yang dimiliki Himbara (himpunan bank Negara), yakni BNI, BRI, Bank Mandiri dan BTN diharapkan penerapan kartu ini mendukung inklusi keuangan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik

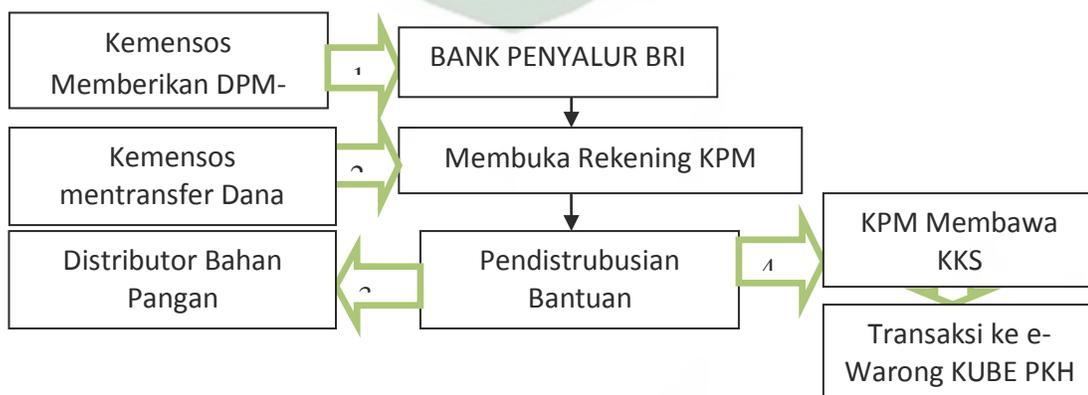
Warong Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan menyatakan bahwa pembentukan e-Warong KUBE PKH bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat bantuan sosial.

Sejak tahun 2017 di Kota Pekanbaru dan Kementerian Sosial Republik Indonesia telah memberikan bantuan dana non tunai kepada warong-warong yang telah ditunjuk. Di Kota Pekanbaru sendiri khususnya di Kecamatan Tenayan Raya merupakan Kecamatan yang paling banyak masyarakatnya menjadi penerima atau pemanfaat Program ini setelah itu diikuti oleh Kecamatan Rumbai, Kecamatan Tampan, Kecamatan Marpoyan Damai dan Kecamatan Rumbai Pesisir.

Bantuan pangan non tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakannya. Besarnya manfaat adalah Rp. 110.000 per bulan, bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai hanya dapat ditukarkan dengan beras/telur sesuai kebutuhan di e-warong.

Dalam pendistribusian manfaat bantuan pangan non tunai melalui E-Warong KUBE PKH secara garis besar mencakup:

Gambar I.1 Mekanisme Pendistribusian Manfaat



Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2018

Adapun Program keluarga harapan (PKH) dan yang tidak Program keluarga harapan (PKH) di Kota Pekanbaru dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel I.2 : Program Keluarga Harapan (PKH) dan yang tidak Program keluarga harapan (PKH) di Kota Pekanbaru Tahun 2017

No	Kecamatan	Non PKH	PKH	Jumlah
1.	Bukit Raya	878	474	1352
2.	Lima Puluh	373	431	804
3.	Marpoyan Damai	1681	618	2299
4.	Payung Sekaki	869	627	1496
5.	Pekanbaru Kota	487	265	752
6.	Rumbai	1718	908	2626
7.	Rumbai Pesisir	1501	632	2133
8.	Sail	225	198	423
9.	Senapelan	862	284	1146
10.	Sukajadi	778	272	1050
11.	Tampian	1354	1132	2486
12.	Tenayan Raya	2600	1300	3900
Jumlah Total		13326	7141	20467

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru 2018.

Berdasarkan tabel 1 diatas jumlah keseluruhan hasil setelah dibagi yaitu Non PKH berjumlah 13326 sedangkan untuk PKH yang telah melalui tahap proses pemberkasaan dan dinyatakan masuk kategori kondisi social ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan berjumlah 7141 dari jumlah total masyarakat yang berkategori kurang mampu secara keseluruhan yang terdapat di 12 kecamatan yaitu sebesar 20467. Dalam pelaksanaan Program Elektronik Warong KUBE PKH di Kota Pekanbaru dilaksanakan dalam jangka waktu 1 Tahun. Berikut ini merupakan data mengenai Program Elektronik Warong KUBE PKH yang telah berjalan di Kota Pekanbaru, yaitu:

Tabel I.3 : Daftar E-Warong Aktif di Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Kelurahan	Nama E Warong
1	Payung Sekaki	Labuh Baru Barat	Rawa Bening Harapan
2	Payung Sekaki	Tampan	Berkah Bersama
3	Senapelan	Padang Terubuk	Cahaya Dini
4	Tenayan Raya	Rejosari	Marwah Hangtuh
5	Tenayan Raya	Kulim	Serantau Madani
6	Tenayan Raya	Kulim	Sialang Rampai
7	Tenayan Raya	Tangkerang Timur	Harapan Sejahtera
8	Marpoyan Damai	Tangkerang Barat	Abidin Sejahtera
9	Marpoyan Damai	Maharatu	Berkah Harapan
10	Sukajadi	Pulau Karam	Mutiara Baroqah
11	Tampan	Sidomulyo Barat	Lancang Kuning Sejahtera
12	Tampan	Delima	Rajawali
13	Tampan	Simpang Baru	Ketitiran
14	Rumbai Pesisir	Meranti Pandak	Kayu Aro
15	Rumbai Pesisir	Lembah Damai	Damai Sejahtera
16	Rumbai Pesisir	Limbangan	Pesisir Sejahtera
17	Sail	Suka Maju	Membawa Baroqah
18	Suka Jadi	Pulau Karam	Mutiara Berqah
19	Bukit Raya	Simpang Tiga	Mulia Sejahtera
20	Lima Puluh	Tanjung Rhu	Berkah Sejahtera
21	Pekanbaru Kota	Kota Baru	Kartini
22	Rumbai	Palas	Teratai
23	Rumbai	Sri Meranti	Rumbai Sejahtera
24	Rumbai	Rumbai Bukit	Hang Nadim Sejahtera

Sumber: Data Dinas Sosial Kota Pekanbaru 2017

Selain itu dalam pelaksanaan Program Elektronik Warong KUBE PKH di Kota Pekanbaru tahun 2018 juga terdapat Warong yang belum aktif, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.4 : Daftar E-Warong yang belum aktif di Kota Pekanbaru

No.	KECAMATAN	KELURAHAN	E-WARONG
1	Rumbai Pesisir	Lembah Sari	Darusalam Sejahtera
2	Marpoyan Damai	Tangkerang Tengah	Dakota Yakin
3	Lima Puluh	Rintis	KUBE rintis Berseri
4	Tenayan Raya	Sail	Sukses Mandiri
5	Sahabat Kita	Sekip	Sahabat Kita

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru 2017

Berdasarkan tabel diatas, juga terdapat pelaksanaan Elektonik Warong KUBE PKH yang belum aktif yaitu sebanyak 5 kecamatan yang berada di Kota Pekanbaru, pelaksanaannya Program Elektronik Warong KUBE PKH di Kota Pekanbaru masih belum terlaksana secara efektif.

Selain permasalahan diatas penulis juga menemukan permasalahan lain dilapangan antara lain adalah:

1. Terindikasi lamanya dana cair dari pihak Bank dan dari pihak Pemerintah menjadikan masyarakat harus menunggu sampai dana dicairkan baru bisa berbelanja kebutuhan.
2. Terindikasi kurangnya sosialisasi dilapangan menjadikan kendala dalam pencapaian keberhasilan Program. Sosialisasi yang dilakukan pihak Kementerian Sosial Kota Pekanbaru hanya diadakan 1-2 kali dalam satu tahun.
3. Jaringan bermasalah sehingga menyebabkan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) tidak bisa berbelanja.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengangkat judul penelitian yang relevan dengan masalah penelitian adalah sebagai berikut: **“Efektivitas Elektronik Warong Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (E-Warong KUBE PKH) Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2018”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana Efektivitas Elektronik Warong Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (E-Warong KUBE PKH) Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2018?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Seiring dengan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Elektronik Warong Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (E-Warong KUBE PKH) Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2018?
2. Untuk mengetahui hambatan dalam Efektivitas Elektronik Warong Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (E-Warong KUBE PKH) Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2018?

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat dan kegunaan penelitian untuk bidang teoritis dan praktis. Adapun kegunaan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memaparkan permasalahan penelitian dengan tepat agar lebih mudah dipahami serta dapat menjadi sumber informasi studi terdahulu bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian yang sama dan sebagai sarana pengembangan ilmu yang diperoleh penulis selama mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi.
2. Secara praktis, penelitian diharapkan mampu memberikan informasi dan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta menambah pengetahuan yang berguna dalam memperluas khazanah ilmu pengetahuan.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Ilmu Pemerintahan dan Pemerintahan

Sebelum lebih jauh melangkah dalam penulisan ini, penulis mencoba mengajak melihat definisi pemerintahan yang dipandang sebagai ilmu pengetahuan. Memandang dari sudut ilmu pemerintahan, Syafei (2004:18) menjelaskan pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pengurusan (*Eksekutive*), pengaturan (*Legislative*), kepemimpinan, dan koordinasi pemerintah (baik pusat dengan daerah maupun antara rakyat dengan yang diperintahnya). kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan Program dan hasil-hasilnya kepada semua pihak, khususnya kepada badan legislatif. Secara terperinci, akuntabilitas mencakup tiga aspek atau asas yang saling berkaitan, yaitu akuntabilitas manajerial, proses, dan Program.

Konsep ilmu pemerintahan menurut H.A. Barsz dalam Syafi'i (2004:21) mengatakan bahwa maksudnya ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan, baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya.

Menurut Ndraha (2005:34) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan setiap orang akan jasa

publik dan layanan sivil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Sedarmayanti (2004:11) menyatakan terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan apresiasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlansung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari (KKN) Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Ndraha (2005:141) mendefinisikan pemerintahan, yaitu proses cara perbuatan, pemerintah. Selanjutnya Ndraha juga mengatakan (2005:2004) Pemerintahan (*Government*) adalah pelaku Sub Kultur Kekuasaan (SKK) dan hanya salah satu di antara ketiga sub kultur masyarakat, tanpa ada sub kultur lainnya tidak terjadi pemerintahan, tanpa SKE dan SKP yang terjadi adalah unjuk kekuatan, pemaksaan, aksi kekerasan, kesewenang-wenangan, dan penindasan SKK terhadap dua sub kultur lainnya.

Menurut Iver dalam Syafei (2005:22) Pemerintah adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan serta bagaimana manusia itu bisa diperintah. Apabila ditinjau dari defenisi pemerintahan, syafei (2005:20) mengemukakan bahwa pemerintah berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur, yaitu ada dua pihak yang terkandung,

kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Kemudian Budiarto (2008:21) menjelaskan bahwa pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu negara memiliki tujuan untuk mewujudkan negara berdasarkan konsep dasar negara tersebut. Selanjutnya konsep-konsep tercapainya negara dalam ilmu politik adalah negara (*state*), kekuasaan (*Power*), pengambilan keputusan (*Decisionmaking*), kebijaksanaan (*policy, beleid*) dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*).

Menurut M. Ryas Rasyid secara umum tugas pokok pemerintahan mencakup tujuh (7) bidang, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan di dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontok diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
- c. Menjamin diterapkannya peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat, tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.
- d. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah atau yang lebih baik dikerjakan oleh pemerintah.
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan social
- f. Menetapkan kebijaksanaan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
- g. Menerapkan kebijaksanaan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

2. Azaz Penyelenggaraan Pemerintahan

Asas Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dianut oleh Indonesia yaitu adanya pelimpahan wewenang dari organisasi tingkat atas pada tingkat bawahnya secara hirarkis. Melalui wewenang itulah Pemerintah pada tingkat bawah didiberikan kesempatan untuk mengambil inisiatif dan mengembangkan kreatifitas, mencari solusi terbaik atas setiap masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Selain itu desentralisasi dapat juga dipahami sebagai penyerahan wewenang politik dan perundang-undangan untuk perencanaan, pengambilan keputusan, dan manajemen pemerintahan dari Pemerintah (pusat) kepada unit-unit sub nasional (Daerah/wilayah) administrasi negara atau kepada kelompok-kelompok fungsional atau organisasi non Pemerintahan/swasta (Rasyid, 2000:4).

Dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan Pemerintahan negara dipegang oleh Presiden dalam Pasal tersebut mengatur bahwa presiden republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang – Undang Dasar. Selanjutnya kekuasaan Pemerintahan negara merupakan urusan pemerintahan. Kekuasaan Pemerintahan atau urusan Pemerintahan.

Dibagi kepada Provinsi, Kabupaten dan Kota sebagai Daerah otonom atau Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18, 18 A dan Pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945. Dari awal kemerdekaan, pelaksanaan Pemerintahan Daerah merupakan bentuk realisasi amanat yang tertuang dalam salah satu pasal Undang-Undang Dasar 1945,yaitu pasal 18 jadi memang merupakan suatu tekat lama yang telah di berikan

oleh the Founding Fathers Indonesia, agar Pemerintahan Daerah menjadi bagian dari Sistem Pemerintahan Indonesia. Setelah amandemen yang ke empat, pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 mengalami beberapa perubahan ketentuan Pemerintahan Daerah menjadi bagian dari Sistem Pemerintahan Indonesia. Setelah amandemen yang ke empat, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 mengalami beberapa perubahan. Dengan adanya amandemen tersebut maka Daerah besar dan Daerah kecil menjadi jelas. Daerah besar Provinsi sedangkan Daerah kecil adalah Kabupaten /Kota dan desa atau dengan nama lain. Hal ini yang lebih jelas lagi adalah bahwa penyebutan secara eksplisit, bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah baik Provinsi, Kabupaten/Kota berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Yang di maksud disini adalah asas desentralisasi dan *madebwind* (tugas pembantu pembantuan) Negara Indonesia adalah Negara kesatuan dengan Sistem desentralisasi. (Josef Riwu 1982).

Asas tugas Pembantuan merupakan salah satu asas dalam pelaksanaan otonomi daerah, bersama dengan asas dekosentras dan desentralisasi, sebagaimana dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Karena berbagai Faktor, misalnya kondisi geografis yang susah di jangkau atau keterbatasan sumberdaya seperti tenaga maka pemerintah pusat perlu menggandeng pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Asas tugas pembantuan bisa dilakukan disemua tugas pemerintahan pusat, kecuali enam wilayah yang menjadi wewenang mutlak pemerintah pusat yaitu :

- a. Politik Luar negeri
- b. Pertahanan
- c. Keamanan
- d. Yustisi atau peradilan
- e. Moneter dan fiskal nasional
- f. agama

3. Fungsi Pemerintahan

Menurut Ndraha fungsi pemerintahan adalah jenis tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan. Dalam menjalankan rode pemerintahan, pemerintah mempunyai tiga fungsi yaitu :

- a. Fungsi pengaturan, fungsi pengaturan ini dilakukan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur hubungan dalam masyarakat. Karena masyarakat menghendaki adanya aturan dan tatanan yang disepakati oleh semua pihak. Dalam hal ini pemerintah adalah hak yang dapat melakukan, merupakan peraturan dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.
- b. Fungsi pemerdayaan, dalam fungsi ini pemerintah dibebani kewajiban untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan pemerintahan. Kecuali pemerdayaan itu juga dilakukan pada kalangan para aparat itu sendiri, agar mereka lebih berkualitas dalam melaksanakan secara optimal jika pelaksanaannya cukup tangguh danberbobot.
- c. Fungsi pelayanan, merupakan fungsi utama pemerintah dan cukup beragam, dengan adanya fungsi ini diharapkan pemerintah akan dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya.

Selain itu menurut Ndraha pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu :

1. Fungsi primer (pelayanan)
Fungsi primer adalah fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa public yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk juga hamkam, layanan civil dan pelayanan birokrasi.
2. Fungsi sekunder (pemerdayaan) adalah fungsi pemerintah sebagai provider kebutuhan dan tuntutan uang diprintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tidak berdaya (*prowerless*) termasuk penyedian dan pembangunan sarana dan prasarana.

Selanjutnya Rasyid berpendapat bahwa fungsi-fungsi pemerintahan adalah :

1. Fungsi pengaturan
Fungsi pengaturan yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat.
2. Fungsi pelayanan
Fungsi pelayanan adalah memberikan pelayanan kepada seluruh warga Negara dan selanjutnya akan membuahkan keadilan dalam masyarakat.
3. Fungsi pemerdayaan
Fungsi pemerdayaan adalah mendorong kemandirian masyarakat sehingga menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.
4. Fungsi pembangunan
Adanya pemerdayaan, maka secara tidak langsung pembangunan akan tercipta.

Menurut Labolo dalam buku Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori, Konsep dan Pengembanganya (2010:32), membagi fungsi pemerintah menjadi empat bagian, yaitu:

1. Pelayanan (*public service*)
2. Pembangunan (*development*)
3. Pemberdayaan (*empowering*)
4. Pengaturan (*regulation*)

Fungsi-fungsi pemerintahan yang di jalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintahan selanjutnya menjalankan fungsinya dengan baik, maka tugas-tugas pokok dapat terlaksanakan dengan baik seperti pelayanan dapat membuahkan keadilan, pelayanan membuahkan kemandirian, serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran. Proses pemberdayaan masyarakat pada umumnya membentuk dan membangun kesejahteraan dan kemandirian masyarakat untuk melawan arus globalisasi yang cepat saat ini.

4. Konsep Kebijakan Publik

Kata kebijakan secara etimologis berasal dari kata "Polis" dalam bahasa Yunani (Greek) artinya "Negara Kota". Dalam bahasa Latin yaitu Politia atau negara. Bahasa Inggris lama (Middle English) dinilai policie yaitu berkaitan dengan unsur pemerintah atau administrasi pemerintah (Dunn, 2003:29). Kemudian dalam bahasa Indonesia "Kata Kebijakan dan Kebijaksanaan" Bijak atau bijaksana dalam bahasa Inggris "*wisdom*". Asal katanya "*Wise*". Dan pengertian ini sifat bijaksana itu bukan hanya sekedar "pintar atau cerdas (*smart*)".

Secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan Pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana, dan Program yang akan dilaksanakan secara jelas. (Koryati, 2005:7).

Kebijakan publik menurut Dye (dalam Agustino, 2008:7) adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan. Rose (dalam Agustino, 2008:7) kebijakan public sebagai sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.

Selanjutnya dapat dilihat pengertian kebijakan publik yang dikemukakan oleh Richard Rose dalam Winarno (2007:16) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri.

Winarno (2007:144) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan Undang-Undang. Dimana implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan Undang-Undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan dan Program-Program.

Nugroho (2004:101) menjelaskan bahwa perumusan kebijakan adalah inti dari kebijakan publik yang dilihat dari kebijakan publik yang ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik untuk meningkatkan kehidupan publik itu sendiri yang dinilai dari ketersediaan kemampuan sumber daya manusia.

Kebijakan publik merupakan salah satu produk dan kegiatan dan administrasi dan manajemen didalam sebuah organisasi. Yang meliputi tahapan-tahapan formulasi, implementasi dan evaluasi. Sejalan dengan itu kebijakan publik dapat didefinisikan sepanjang masa karena kebijakan publik tetap ada dan terus ada sepanjang masih ada negara yang mengatur kehidupan bersama (Nugroho,2004:1). Hal ini sejalan dengan kajian administrasi negara yang secara sensitif harus menanggapi isu-isu pokok dalam masyarakat dan mampu memformulasikan kedalam rumusan kebijaksanaan.

Nugroho (2004:101) mengatakan bahwa kebijakan publik ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik untuk meningkatkan kehidupan publik itu sendiri. Kebijakan menurut Mustopadidjaja adalah keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu atau untuk

mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam (1) pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun unit organisasi pelaksana kebijakan, (2) penerapan atau pelaksana dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan unit organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan. (Nurcholis, 2005;158).

Menurut (N. Dunn, 2000:23) Analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan tentang dan dalam proses kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan dan Program publik. Analisis kebijakan dilakukan untuk menciptakan secara kritis, menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau lebih dalam proses pembuatan kebijakan.

Carl J Federick dalam Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Richard Rose dalam Budi Winarno (2007:17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak

berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Selanjutnya dapat dilihat definisi kebijakan adalah kata kebijaksanaan yaitu perilaku seseorang baik pejabat atau perorangan, kelompok kekuatan politik atau kelompok pakar atau instansi pemerintahan yang terlibat dalam suatu bidang kegiatan tertentu yang diarahkan pada rumusan masalah atau permasalahan yang sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu. Untuk selanjutnya mengacu kepada tindak atau tindakan berpola yang mengarah kepada tujuan seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan dan atau mewujudkan sasaran yang ingin dicapai.

5. Konsep Program Keluarga Harapan

Program keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu Program penanggulangan kemiskinan yang telah diterapkan di Indonesia. Kedudukan PKH merupakan bagian dari Program-Program penanggulangan kemiskinan lainnya. PKH berada di bawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di Pusat maupun di daerah. Oleh sebab itu akan segera dibentuk Tim Pengendali PKH dalam TKPK agar terjadi koordinasi dan sinergi yang baik. PKH merupakan Program lintas Kementerian dan Lembaga, karena aktor utamanya adalah dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Daerah, Departemen Sosial (Dinas Sosial), dan Badan Pusat Statistik. Untuk mensukseskan Program tersebut, maka dibantu oleh

Tim Tenaga ahli PKH dan konsultan *World Bank*. (Kementerian Sosial RI, 2017, *Program Keluarga Harapan*, diakses pada 10 Oktober 2019)

Program Keluarga Harapan (PKH) sebenarnya telah dilaksanakan di berbagai negara, khususnya negara-negara Amerika Latin dengan nama Program yang bervariasi. Namun secara konseptual, istilah aslinya adalah *Conditional Cash Transfers (CCT)*, yang diterjemahkan menjadi Bantuan Tunai Bersyarat. Program ini "bukan" dimaksudkan sebagai kelanjutan Program Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin.

6. Bantuan Pangan Non Tunai

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran, penyaluran bantuan sosial kini tidak lagi menggunakan sistem uang tunai melainkan dengan memanfaatkan sistem teknologi dan peluang inovasi untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan. Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia (dalam Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai, 2017:4), Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di e-Warong yang bekerjasama dengan bank.

Sebagai contoh Negara India menggunakan sistem pembayaran bantuan sosial dengan menggunakan non tunai biometrik. Teknologi biometrik relevan dengan teknologi yang bisa digunakan untuk menganalisa fisik dan kelakuan manusia secara autentifikasi. Teknologi ini bisa mengenali manusia melalui sidik jari, mata dan karakter khas bagian tubuh lainnya. Dengan teknologi biometrik, masyarakat tidak perlu menghafal pin. Sebab, bisa menggunakan sidik jari, mata, hingga wajah. Dengan begitu penerima manfaat akan lebih tepat, karena tidak bisa digantikan orang lain serta dapat mengurangi tindakan-tindakan kecurangan (Pkhdaily.com, diakses pada tanggal 13 Februari 2018).

Tidak jauh berbeda dengan Negara India, Indonesia juga menyalurkan bantuan sosial dengan menggunakan sistem non tunai, sebagai contoh dalam penyaluran bahan-bahan kebutuhan sehari-hari, yang disebut bantuan pangan non tunai. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas bantuan sosial, ketepatan sasaran serta untuk mendorong keuangan inklusif. Melalui penyaluran bantuan sosial non tunai dengan menggunakan sistem perbankan, diharapkan dapat mendukung perilaku produktif penerima bantuan, serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas Program untuk kemudahan dalam mengontrol, memantau dan mengurangi penyimpangan (Kementerian PPN/ Bappenas, 2017).

Dengan demikian, tujuan Program bantuan pangan secara non tunai ini selain meningkatkan ketepatan kelompok sasaran, juga untuk memberikan nutrisi yang lebih seimbang, mendorong usaha eceran rakyat, memberikan akses jasa keuangan pada rakyat miskin serta mengefektifkan anggaran dengan penerapan Program e-Warong

KUBE PKH. Selain itu, penyaluran bantuan pangan secara non tunai juga diharapkan dapat berdampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat.

7. Warong KUBE PKH

Elektronik Warong gotong royong kelompok usaha bersama Program keluarga harapan adalah sarana usaha yang didirikan dan dikelola oleh KUBE Jasa sebagai sarana pencairan bantuan sosial berupa bahan pangan pokok dan/atau uang tunai secara elektronik, kebutuhan usaha, serta pemasaran hasil produksi anggota KUBE . E-Warong KUBE PKH merupakan Program lanjutan dari Program Keluarga Harapan yang sudah berjalan mulai dari tahun 2007. Selain itu gagasan pembentukan e-Warong KUBE PKH juga berawal dari pemberdayaan masyarakat yang telah terbentuk yaitu Kelompok Usaha Bersama atau sering didengar dengan KUBE . E-Warong KUBE PKH merupakan Warong sembako biasa namun dalam proses transaksinya yang berbeda yakni berupa non tunai atau elektronik yang sesuai dengan arahan presiden dengan memperluas keuangan inklusif.

E-Warong KUBE PKH merupakan hasil kerja sama Kementerian Sosial dengan Bank pelaksana (Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia), Badan urusan logistic (Bulog), dan Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera (KMIS) untuk mendistribusikan bantuan sosial PKH secara non tunai Bantuan sosial yang hanya diakses oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mempunyai Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Program e-Warong merupakan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah dengan menggunakan sistem perbankan. Dalam hal ini masyarakat penerima bantuan diberikan bantuan secara non-tunai dengan cara mengirim dana bantuan ke masing-masing rekening penerima manfaat yang telah disediakan oleh bank terkait. Selanjutnya penerima manfaat dapat membelanjakan dana bantuan pangan ke e-Warong KUBE PKH yang telah dibentuk oleh sekelompok anggota penerima manfaat.

Electronic government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat, urusan bisnis serta hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan. *Electronic government* dapat diterapkan dalam pemerintahan legislatif, yudikatif atau administrasi publik guna meningkatkan efisiensi internal, penyampaian informasi dan pelayanan publik maupun proses pemerintahan yang demokratis.

Secara umum pengertian *electronic government* adalah sistem manajemen informasi dan layanan masyarakat berbasis internet. Layanan ini diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Dengan memanfaatkan akses internet maka akan memunculkan banyak pengembangan modus layanan dari pemerintah kepada masyarakat yang memungkinkan masyarakat berperan secara aktif, secara sadar dan mandiri melakukan registrasi perizinan, melakukan pembayaran secara langsung untuk setiap layanan publik lainnya. Dengan bantuan internet, semua hal tersebut dapat dilakukan darimana saja dan kapan saja. Dengan adanya fasilitas-fasilitas yang memudahkan tersebut, masyarakat diharapkan lebih produktif karena masyarakat

tidak perlu lagi antri dan membuang waktu yang lama hanya untuk melakukan sebuah administrasi atau yang lainnya. Masyarakat dapat memanfaatkan banyak waktunya untuk melakukan pembangunan lain sehingga dengan online sistem ini diharapkan produktifitas nasional dapat meningkat. “*E-Government is the application of Information and Tecnology Communication (ICT) by government agencies*” (*e-Government* adalah aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dari agen pemerintah).”(ndrajit, 2002:6).

8. Konsep *e-Government*

Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang *e-Government* diperlukan pemahaman tentang definisi *e-Government* itu sendiri, sebutan *e-Government* memiliki banyak definisi, adapun pengertian atau definisi yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah pengertian menurut World Bank (2004), yang memberikan definisi sebagai berikut:

E-Government refers to the use by government agencies of information technologies that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government. These technologies can serve a variety of different ends: better delivery of government services to citizens, improved interactions with business and industry, citizen empowerment through access to information, or more efficient government management. The resulting benefits can be less corruption, increased transparency, greater convenience, revenue growth, and/or cost reductions”.

E-Government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah yang memiliki kemampuan untuk mengubah hubungan dengan warga negara, bisnis, dan unit lain dari pemerintah. Teknologi yang digunakan ini dapat melayani sebuah keragaman yang berbeda yaitu pemberian pelayanan pada

warganegara yang lebih baik, meningkatkan interaksi dengan dunia bisnis dan industri, pemberdayaan masyarakat melalui akses terhadap informasi, atau manajemen pemerintah yang lebih efisien. Hasil yang didapat yaitu korupsi yang berkurang, transparansi yang meningkat, kenyamanan yang lebih besar, peningkatan penerimaan negara, dan atau pengurangan biaya. (Grönlund, 2008). E-government adalah garda terdepan dari upaya pemerintah dalam menyediakan informasi dan pelayanan kepada masyarakat, kelompok bisnis, pegawai pemerintah, dan organisasi masyarakat (Yu-Che Chen & James Perry, 2003).

E-Government juga merupakan sebuah cara bagi pemerintah untuk menggunakan teknologi baru untuk melayani masyarakat akses terhadap informasi dan pelayanan pemerintah dengan nyaman, untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan untuk menyediakan kesempatan yang lebih besar dalam berpartisipasi pada proses dan institusi demokratis. Sedangkan holmes mendefinisikan *e-Government* :

“...is the use of information technology, in particular the internet, to deliver public services in a much more convenient, customer-oriented, cost-effective, and altogether different and better way. It affects an agency’s dealing with citizens, businesses, and other public agencies as well as its internal business processes and employees.” (Holmes, 2001: 2)

Dari beberapa definisi tentang *e-Government* diatas secara umum, dapat ditarik sebuah kesimpulan penting dari penekanan definisi yang dikemukakan oleh lembaga dan para ahli terhadap tersebut yaitu: *e-Government* adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi terbaru oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan intensif kepada masyarakat, pelaku bisnis dan lingkungan pemerintah dengan menggunakan aplikasi berbasis web melalui perubahan pada proses internal

dan eksternal dalam rangka mengurangi korupsi, meningkatkan transparansi, kemudahan yang semakin bertambah, peningkatan pendapatan, dan mengurangi ongkos dalam penyelenggaraan pemerintahan.

9. Tujuan dan Sasaran *e-Government*

Dalam prakteknya, *e-Government* adalah penggunaan *internet* untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik dan cara yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Secara ringkas tujuan yang ingin dicapai dengan *e-Government* adalah untuk menciptakan *customer online* dan bukan *in line*. Selain itu *e-Government* bertujuan memberikan pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai institusi publik dan sistem antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan suatu pelayanan yang sederhana, murah dan efektif. Sehingga tujuan mendasar yang ingin dicapai dari implementasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.
- c. Perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja pemerintahan. (*Blueprint Sistem Aplikasi e-Government*, 2004: 21).

Kemudian selain tujuan dasar tersebut, bahwa *e-Government* mempunyai sasaran pembangunan *e-Government* sebagai berikut:

- a. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau.
- b. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.
- c. Pembentukan mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintah serta penyediaan fasilitas bagi partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.

- d. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah. (*Blueprint Sistem Aplikasi e-Government 2004: 21*)

Situs pemerintah daerah merupakan salah satu strategi didalam melaksanakan pengembangan *e-Government* secara sistematis melalui tahapan yang realistis sangat terukur. Pembuatan situs pemerintah daerah merupakan tingkat pertama dalam pengembangan *e-Government* dengan sasaran agar masyarakat dapat dengan mudah memperoleh akses kepada informasi dan layanan pemerintah baik pada tingkat pusat ataupun daerah, serta ikut berpartisipasi di dalam pengembangan demokrasi di dengan menggunakan media internet.

10. Konsep Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun Program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat S. (2006:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Menurut Effendy (2008:14) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: "Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan" Efektivitas menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Pengertian lain menurut Susanto (2005:156), "efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi". Menurut pengertian Susanto di atas, efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting peranannya di dalam setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi itu sendiri (Sedarmayanti, 2006:61).

Setiap organisasi atau lembaga di dalam kegiatannya menginginkan adanya pencapaian tujuan. Tujuan dari suatu lembaga akan tercapai segala kegiatannya

dengan berjalan efektif akan dapat dilaksanakan apabila didukung oleh faktor-faktor pendukung efektivitas.

Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan (2005:109) mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan Program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (2006) yang menjelaskan bahwa :“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila

dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

2. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian (2008:77), yaitu:

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuantujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional
- 4) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.

- 5) Penyusunan Program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam Program-Program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- 7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu Program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya
- 8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

3. Indikator Efektivitas

Menurut Budiani dalam Monica Peratiwi, Herbasuki Nurcahyanto (2017:3) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas Program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:

1) Ketepatan Sasaran Program

Perahaman Program dalam hal ini sejauh mana peserta Program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Program yang telah dilaksanakan harus ditujukan kepada sasaran yang tepat sesuai dengan kriteria peserta Program yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan Program dapat berjalan dengan efektif. Kesesuaian antara tujuan Program dan sasaran peserta Program mempengaruhi keberhasilan Program.

2) Sosialisasi Program

Kemampuan penyelenggaran Program dalam melakukan sosialisasi Program sehingga informasi mengenai pelaksanaan Program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta Program pada

khususnya. Dilihat dari adanya kesesuaian sasaran Program dengan tujuan yang telah ditentukan. Program yang telah dilaksanakan harus ditunjukkan kepada sasaran yang kongkret, sehingga proses pelaksanaan Program dapat berjalan dengan efektif.

3) Tujuan Program

Tujuan Program yaitu, sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan Program dengan tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya. Dalam hal ini pelaksanaan sebuah Program harus mampu termanifestasikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga keefektifan suatu Program dapat diukur dengan tujuan Program yang telah ditetapkan.

4) Pemantauan Program

Pemantauan Program ialah kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya Program sebagai bentuk perhatian kepada peserta Program. Dalam hal ini pemantauan Program berupa evaluasi yang dapat di ukur dengan sejauh mana suatu Program memberikan efek atau dampak terhadap perubahan yang nyata bagi masyarakat peserat Program serat pelaksanaan Program harus sesuai dengan waktu dan tujuannya.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dengan penelitian terdahulu, dan untuk menjadikan dasar penelitian ini, maka berikut ini dilampirkan beberapa penelitian yang telah dilakukan tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Program Elektronik Warong KUBE PKH di Kota Pekanbaru Tahun 2018, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Mavita Anarizka, Nina Widowati (2017) yang berjudul ***“Akuntabilitas Pelaksanaan Program Elektronik Warong Gotong Royong (E-Warong) Di Kecamatan Banyumanik”***. Berdasarkan hasil penelitian Akuntabilitas pelaksanaan Program E-Warong (Elektronik Warong Gotong Royong) di Kecamatan Banyumanik belum optimal dilihat dari dimensi akuntabilitas yang dijadikan tolak ukur masih belum tercapai dan adanya faktor penghambat dalam pelaksanaan Program. Persamaan penelitian ini terletak pada objek penelitian yaitu Program elektronik warong KUBE (PKH), Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan objek penelitian, yaitu focus pada Efektivitas Program Elektronik Warong KUBE PKH di Kota Pekanbaru.
2. Penelitian oleh Indira Putri Pramesti, (2017) yang berjudul ***“Program E-Warong KUBE Srikandi di Kota Malang Tahun 2017 (Studi Di Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen)”*** dari hasil temuan di objek penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program pada e-Warong KUBE “Srikandi” masih belum optimal karena masih terdapat pelaksanaan yang tidak sesuai pendekatan top-down model implementasi dari Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier diantaranya adalah

pada karakteristik masalah terdapat permasalahan teknis, sifat populasi yang tidak mampu menjangkau selain Kelurahan Bareng. Persamaan penelitian ini terletak pada objek penelitian yaitu Program elektronik warong KUBE (PKH). Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan objek penelitian, yaitu focus pada Efektivitas Program Elektronik Warong KUBE PKH di Kota Pekanbaru.

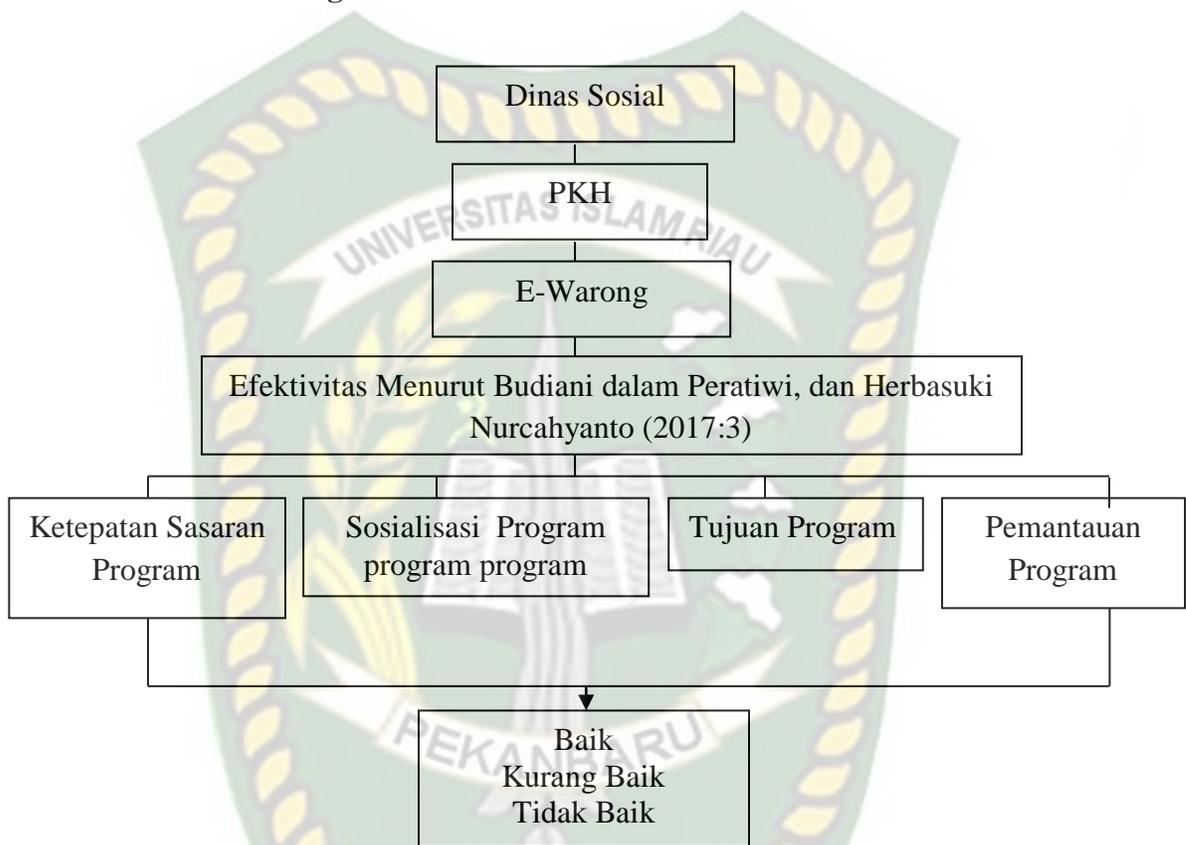
3. Risnandar dan Aditya Wisnu Broto (2017), yang berjudul *“Implementasi Program Bantuan Sosial Non Tunai Di Indonesia”* Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Program penyaluran BPNT melalui e-Warong sudah cukup progresif, efektif dan efisien serta sangat potensial dalam memberdayakan keluarga penerima manfaat secara berkelanjutan, namun masih ada hal-hal yang harus diperbaiki seperti: pematapan proses bisnis secara komprehensif, pendampingan Program secara intensif berkelanjutan, dan pembangunan jejaring kerja. Persamaan penelitian ini terletak pada objek penelitian yaitu Program elektronik warong KUBE (PKH), Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan objek penelitian, yaitu focus pada Efektivitas Program Elektronik Warong KUBE PKH di Kota Pekanbaru.

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pada variabel penelitian Efektivitas Program Elektronik Warong KUBE PKH di Kota Pekanbaru. Kemudian diukur dengan acuan dari beberapa teori yang dijadikan indikator serta fenomena yang terjadi, maka penulis menjelaskan hubungan tersebut agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penafsiran makna

dan maksud penelitian. Berdasarkan pada penjelasan tersebut maka penulis menyusun pengembangan kerangka fikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

Gambar II.1 : Kerangka fikir



Sumber: Data Olahan 2019

D. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep teori yang disesuaikan dengan kondisi lapangan sewaktu penelitian. Adapun yang menjadi konsep operasional dalam penelitian tentang Efektivitas Elektronik Warong Gotong Royong Kelompok Usaha

Bersama Program Keluarga Harapan (E-Warong KUBE PKH) Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2018 adalah:

1. Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pengurusan (*Eksekutive*), pengaturan (*Legislative*), kepemimpinan, dan koordinasi pemerintah (baik pusat dengan daerah maupun antara rakyat dengan yang diperintahnya).
2. Pemerintah adalah “perintah” yang memiliki empat unsur, yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.
3. Efektivitas adalah unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun Program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.
4. Program keluarga harapan (PKH) adalah Program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada rumah tangga/ keluarga sangat miskin yang memenuhi syarat.
5. Elektronik warong gotong royong KUBE PKH (e-warong KUBE PKH) adalah tempat usaha dan keagenan yang dikelola dan dimiliki oleh fakir miskin penerima Program KUBE , PKH dan Rastra yang pelayanannya non tunai.

E. Operasional Variabel

Untuk memudahkan arah penelitian yang terdiri dari satu variabel dan dengan enam indikator, maka dilakukan pendefinisian operasional variabel. Adapun operasional variabel dalam penelitian mengenai Efektivitas Elektronik Warong Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (E-Warong KUBE PKH) Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2018, adalah sebagai berikut:

Tabel II.2: Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Item penilaian	Ukuran
Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun Program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat S. (2006:16)	Efektivitas Program Elektronik Warong KUBE PKH	Ketepatan Sasaran Program	1. Sasaran Program sesuai dengan yang sudah ditentukan; 2. Peserta Program yang sesuai dengan kriteria;	Efektif Kurang Efektif Tidak Efektif
		Sosialisasi Program	1. Adanya sosialisasi; 2. Kesesuaian Program dengan tujuan;	Efektif Kurang Efektif Tidak Efektif
		Tujuan Program	1. Kejelasan tujuan Program; 2. Kejelasan manfaat Program;	Efektif Kurang Efektif Tidak Efektif
		Pemantauan Program	1. Adanya pemantauan Program; 2. Adanya evaluasi;	Efektif Kurang Efektif Tidak Efektif

Sumber :Modifikasi penulis, 2018

F. Teknik Pengukuran

Berdasarkan pada konsep operasional di atas, maka penulis akan melakukan pengukuran terlebih dahulu terhadap Efektivitas Program Elektronik Warong KUBE PKH di Kota Pekanbaru Tahun 2018, dengan kategori:

- Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori baik atau berada pada $\geq 67\%$ -100%.
- Kurang Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori kurang baik atau berada pada 34%-66%.
- Tidak Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori tidak baik atau berada pada $\leq 1\%$ -33%.

Adapun pengukuran indikator masing-masing sebagai berikut:

1. Ketepatan Sasaran Program

- Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori baik atau berada pada $\geq 67\%$ -100%.
- Kurang Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori kurang baik atau berada pada 34%-66%.
- Tidak Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori tidak baik atau berada pada $\leq 1\%$ -33%.

2. Sosialisasi Program

- Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori baik atau berada pada $\geq 67\%$ -100%.

Kurang Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori kurang baik atau berada pada 34%-66%.

Tidak Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori tidak baik atau berada pada $\leq 1\%$ -33%.

3. Tujuan Program

Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori baik atau berada pada $\geq 67\%$ -100%.

Kurang Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori kurang baik atau berada pada 34%-66%.

Tidak Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori tidak baik atau berada pada $\leq 1\%$ -33%.

4. Pemantauan Program

Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori baik atau berada pada $\geq 67\%$ -100%.

Kurang Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori kurang baik atau berada pada 34%-66%.

Tidak Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori tidak baik atau berada pada $\leq 1\%$ -33%.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Bentuk penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. (Sugiyono, 2013:14).

Pengertian dari metode deskriptif menurut Sugiyono (2013: 14) adalah: “Metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.”

Sedangkan pengertian kuantitatif menurut Sugiyono (2013: 18) adalah: “Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan penulis lakukan terhitung bulan Juli 2019 hingga selesai. Dimana penelitian ini dilakukan pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Alasannya dikarenakan Program Elektronik Warong KUBE PKH berdasarkan penemuan peneliti dilapangan masih ada terdapat E-Warong yang belum berjalan secara Efektif.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2009:90). Untuk mengetahui jumlah populasi dan sampel pada penelitian ini, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.1: Data Sampel Penelitian

No	Nama	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	1 Orang	1 Orang	100%
2	Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin	1 Orang	1 Orang	100%
3	Pendamping Sosial PKH Kecamatan	12 Orang	12 Orang	100%
4	Anggota PKH untuk wilayah Kecamatan Pekanbaru Kota	265 Orang	30 Orang	60%
Jumlah		279 Orang	44 Orang	20%

Sumber: Data Olahan Penelitian. Tahun 2019

Populasi adalah sekumpulan kasus yang perlu memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah semua unsur bagian yang terlibat dalam Program Elektronik Warong KUBE PKH di Kota Pekanbaru.

D. Teknik Penarikan Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, finansial, waktu, tenaga dan sebagainya maka peneliti dapat menggunakan sampel itu. Untuk sampel pendamping sosial PKH kecamatan dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Metode sampel menggunakan *Sensus* adalah teknik pengambilan sampel dengan menggunakan seluruh populasi sebagai sampel (Margono, 2010: 127).

Sedangkan untuk Penetapan sampel masyarakat dengan menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* yaitu pengambilan sampel secara aksidental (*accidental*) dengan mengambil responden yang kebetulan ada atau tersedia di suatu tempat sesuai dengan konteks penelitian (Notoatmodjo, 2010).

E. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data dan informasi yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh penulis dari objek penelitian, yaitu para responden yang diteliti, berupa data yang diteliti berkaitan dengan masalah yang diteliti, data tentang Efektivitas Program Elektronik Warong KUBE PKH di Kota Pekanbaru,

2. Data skunder, yaitu data yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan penelitian ini, baik dari atau melalui studi kepustakaan maupun data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru tersebut bisa berupa:
 - a. Data mengenai jumlah anggota masyarakat yang terpilih sebagai anggota dari Program elektronik Warong KUBE PKH kota pekanbaru.
 - b. Data tentang profil Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

F. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data merupakan langkah untuk memecahkan sesuatu masalah tertentu. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Kuesioner

Kuesioner, Yaitu suatu alat pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari sampel dengan membuat suatu daftar pertanyaan yang berupa lembaran angket atau kuesioner yang diajukan dan diisi oleh para responden yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan komunikasi kepada informan pada objek penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk mengenali informasi dan informan atau orang

yang dianggap mengetahui tentang permasalahan yang sedang di bahas dalam penelitian.

3. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. (Suwarjeni, 2014) Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data tertulis yang sudah ada sebelumnya. Teknik pengambilan data secara tertulis bersumber pada catatancatatan, arsip-arsip, gambar atau foto-foto pada acara tertentu yang ada di lokasi penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung ke lapangan. Teknik ini dilakukan untuk mendukung data-data penulis. Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambar riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut, atau pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul maka data tersebut dikelompokkan menurut masing-masing variabel beserta indikatornya, kemudian dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif yang dilengkapi dengan data persentase (%) berikut penjelasannya serta dianalisa secara deskriptif berdasarkan temuan-temuan lapangan yang berdasarkan wawancara, angket dan pengamatan mengenai penelitian ini untuk dianalisa guna mendapatkan jawaban akhir dari penelitian ini.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Usulan penelitian ini direncanakan mulai dari bulan September hingga Desember 2019, untuk lebih jelasnya, maka akan dijelaskan jadwal penelitian dalam bentuk table berikut ini:

Tabel III.2. Perincian Jadwal Kegiatan Penelitian Tahun 2019

No	Jenis kegiatan	Bulan dan Minggu Ke.....															
		Sep				Okt				Nov				Des			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	x	X														
2	Seminar UP		X	x													
3	Revisi UP			x	x												
4	Revisi Kuesioner			x	x	x											
5	Rekomendasi Survy				x	x	x										
6	Survy Lapangan					x	x	x	x	x							
7	Analisis Data							x	x	x							
8	Penyusunan Laporan hasil penelitian (Skripsi)									x	x	x					
9	Konsultasi Revisi Skripsi										x	x	x	x	x		
10	Ujian Konferehensif Skripsi												x	x			
11	Revisi Skripsi													x	x		
12	Penggandaan Skripsi															x	

I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Adapun Sistematika penulisan usulan penelitian dalam bentuk skripsi ini di bahas 6 bab, dimana pembahasan-pembahasan bab mempunyai antara satu dengan yang lainnya yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, dalam uraian berikutnya di bahas mengenai perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Pada bab ini membahas landasan teoritis untuk dapat melakukan pembahasan skripsi lebih lanjut mana berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya akan di uraikan kerangka pikir, konsep operasional dan operasional penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini tentang Metode Penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis dan uji hipotesis, jadwal kegiatan penelitian serta rencana sistematika laporan penelitian

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Deskripsi lokasi penelitian yang terdiri dari Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Fungsi, Uraian Tugas, Struktur Organisasi, Sumber Daya Organisasi, Serta Sumber Daya Manusia, Dan Lokasi Penelitian.

BAB V HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas elektronik warong gotong royong kelompok usaha bersama program keluarga Harapan (E-Warong KUBE PKH) oleh dinas sosial kota pekanbaru tahun 2018.

BAB VI PENUTUP

Pada bab akhir ini merupakan bab penutup, penulis membaginya dalam dua sub bab yaitu yang terdiri dari Kesimpulan mengenai ringkasan penelitian penulis dan Saran berupa solusi dan mengatasi sejumlah permasalahan yang menjadi objek penulisan naskah.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Pekanbaru lahir jauh sebelum masuknya penjajah Belanda ke Indonesia pada waktu itu Pekanbaru hanya berupa dusun kecil yang bernama Payung Sekaki. Dusun itu terletak di tepi sungai Siak (tepatnya berada di seberang pelabuhan yang ada saat ini).

Kemudian di zaman kerajaan Siak Sri Indrapura yang di pimpin oleh Sultan Abdul Jalil Amaludin Syah (wafat tahun 1791), dusun ini berkembang dengan pesat menjadi pusat perdagangan dan merupakan jalur lalu lintas kapal-kapal dari berbagai daerah. Pada saat itu pula pusat kerajaan berpindah ke seberang, sebelah selatan (sekitar pasar bawah saat ini) yang kemudian bernama senepelan.

Dalam perkembangan selanjutnya berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar, dan Kampar), Negeri sinapelan berganti nama menjadi Pekanbaru. Penggantian nama ini terjadi di masa Pemerintahan Sultan Muhammad Ali Muazam Syah (1784-1801).

Pada waktu penjajahan Belanda, berdasarkan Belsuit Van Her Inclance Zelf Bestuur Van Siak No. 1 Tahun 1919 Pekanbaru menjadi tempatnya kedudukan Controluer (PHB) Pemerintah Belanda. Sewaktu pendudukan Jepang. Pada tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer (GOKUNG), Istilah distrik menjadi GUM yang dipimpin seorang GUN CHO.

Akhirnya di zaman Pemerintahan Republik Indonesia Pekanbaru berubah status menjadi:

1. Hermente Pekanbaru dan merupakan ibukota Keresidenan Riau berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera di Medan No.103 tanggal 1 Mei 1946.
2. Kota Kecil berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1956.
3. Kota praja berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1957.
4. Ibukota Provinsi Riau setelah dipindahkan dari Tanjung Pinang pada tahun 1959.
5. Kotamadya berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1974.
6. Kota Berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1999.

B. Kondisi Geografis

Kota Pekanbaru adalah Ibu Kota Provinsi Riau dan merupakan Kota terbesar. Kota Pekanbaru secara Internasional memiliki posisi strategis berada pada tiga simpul pertumbuhan yaitu Indonesia-Singapura-Malaysia. Posisi strategis secara nasional berada pada jalur lintas Sumatra yang berhubungan dengan beberapa kota seperti Medan, Padang, dan Jambi. Oleh karena itu Pekanbaru dapat dikatakan sebagai pintu gerbang bagi wisatawan domestik maupun manca negara. Selain itu, Pekanbaru menjadi tempat perkembangan industri di tandai dengan berdirinya bermacam-macam gedung perkantoran dan industri migas, perkebunan, dan industry pariwisata modern.

Luas wilayah Kota Pekanbaru saat ini 632, 26 Km². Secara geomorfologis, Kota Pekanbaru Keadaanya relative merupakan daerah yang datar. Pada tahun 2003 jumlah kecamatan ada sejumlah 12 kecamatan. Secara geografis Kota Pekanbaru berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Siak
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat : Kabupaten Kampar
- Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

C. Deskripsi Umum Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

1. Sejarah singkat Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

Pada tanggal 22 Desember 1948 dibentuk inspeksi Sosial dari tingkatan pusat hingga daerah, pada tahun 1950 berganti nama lagi menjadi Jawatan Sosial Republik Indonesia. Departemen sosial menetapkan kantor wilayahnya di setiap provinsi dan menetapkan petugas Sosial Kecamatan yang berada di tiap-tiap Kota /Kabupaten.

Sejak diperkuatnya pelaksanaan prinsip Otonomi dimana keberadaan Pemerintah Daerah berhak mengurus sendiri rumah tangganya, hal ini berimplikasi juga dengan satuan tugas Departemen Sosial Republik Indonesia yang sebelumnya berkoordinasi langsung dengan kementerian kini harus berada dibawah payung Pemerintahan Daerah. Sejak saat itu berganti nama menjadi Dinas Sosial Provinsi Riau dan pada tingkat kabupaten/kota menjadi Dinas Sosial dan Pemakaman.

Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sebagai Dinas wilayah Kota Pekanbaru berada dalam satuan kerja pemerintahan daerah, Kantor Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru berada di Jl. Dt. Setia maharaja (Jl. Parit Indah). Berdasarkan dengan diberlakukannya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah mengamanatkan Kota Pekanbaru terhadap kewenangan, tugas dan tanggung

jawab untuk melaksanakan rumah tangga daerahnya sendiri beserta kelengkapannya. Maka salah satu kewenangan tersebut yang diberikan kepada Kota Pekanbaru dan menjamin terlaksananya fungsi Pemerintahan Daerah Kota Pekanbaru salah satunya terkait dengan permasalahan sosial dibentuklah Dinas Sosial dibarengi dengan permasalahan pemakaman di Kota Pekanbaru.

2. Visi dan Misi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

Adapaun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru mempunyai visi “Terwujudnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang didukung oleh sumber Daya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Peran Masyarakat Serta Pemakaman Yang Bersih, Tertib dan Indah”

Sedangkan dalam rangka melaksanakan visi misinya, Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru memiliki misi yakni:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Mengembangkan sistem Jaminan Sosial bagi PMKS secara berkelanjutan.
3. Pemberdayaan sosial bagi PMKS agar mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri.
4. Meningkatkan Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
5. Meningkatkan sumber daya penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
6. Meningkatkan dan mengembangkan sumber pendapatan sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Mewujudkan pemakaman yang bersih, tertib dan indah.

Dengan pernyataan Misi ini diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal peran dan keberadaan Dinas Sosial dan

Pemakanaman Kota Pekanbaru. Agar Misi dapat berhasil diperlukan kejujuran dan keberhasilan yang menjadi dasar keyakinan dalam melaksanakan tugas disamping faktor-faktor kunci keberhasilan untuk memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi.

Sasaran merupakan jabatan dan tujuan, ditetapkan dengan menggunakan ukuran kuantitatif sehingga pencapaian dapat diukur dengan jelas yang berfokus pada tindakan dan hasil yaitu kegiatan yang bersifat spesifik terinci dapat diukur dan dapat diwujudkan.

Untuk mencapai hasil yang konsisten dengan Visi, Misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan strategis yang merupakan pemikiran serta konseptual analisis dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mempelancar/mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mendapatkan umpan balik bagi perbaikan diperlukan evaluasi kinerja yaitu merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu unit kerja melaksanakan Misi dan tugas serta fungsi yang dibebankan.

3. Tugas Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah Kota. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru mempunyai

tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah kota di bidang kesejahteraan Sosial dan Pemakaman.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru mempunyai Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai berikut:

1. Melakukan pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang kesejahteraan Sosial yang ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru.
2. Penyusunan pelaksanaan rencana program dibidang pembinaan teknis Kesejahteraan Sosial di Kota Pekanbaru.
3. Melakukan Pengelolaan, penyelenggaraan dan penyuluhan Usaha Kesejahteraan Sosial di Kota Pekanbaru.
4. Pelaksaaan Pembinaan, pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan kepada klien untuk usaha kesejahteraan sosial.
5. Melakukan pengawasan, pengendalian dan pemantauan kepada klien yang telah di latih dan di beri bantuan.
6. Pengelolaan dan pengelohan serta pengumpulan data dan informasi serta evaluasi kegiatan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PMKS).
7. Pelaksanaan Koordinasi antar instansi terkait, lembaga-lembaga dan organisasi masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).
8. Pengelolaan administrasi umum, meliputi ketata laksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan.
9. Pengelolaan Kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) Melalui Petugas Sosial Kecamatan (PSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pengurus Karang Taruna dan lembaga Sosial Masyarakat di kelurahan/desa.
10. Pengelolaan kegiatan Pemakaman dan penertiban lahan-lahan pemakaman dari seluruh kecamatan dan kelurahan.

4. Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

Berdasarkan peraturan daerah nomor 9 tahun 2013 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, Dinas Sosial dan Pemakaman terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial
- d. Bidang Rehabilitas Sosial
- e. Bidang Bantuan Sosial
- f. Bidang Pemakaman

Adapun rincinya sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman

A. Tugas:

- a) Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang sosial dan pemakaman.
- b) Menyelenggarakan usulan pemerintah dan pelayanan dan umum dibidang sosial dan pemakaman.
- c) Membina dan melaksanakan bidang urusan sosial dan pemakaman
- d) Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sosial dan pemakaman.
- e) Membina unit pelaksana teknis dinas lingkup tugasnya
- f) Menyelenggarakan tugas yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Fungsi

- a) Penyelengraaan urusan penatausahaan dinas;
- b) Pelaksanaan tugas-tugas lain, perumusan kebijakan teknis dibidang sosial dan pemakaman
- c) Penyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
- d) Penyusunan rencana kerja; pemantauan dan evaluasi;
- e) Pembinaan dan pelaporan;

2. Sekretaris

A. Tugas:

- a) Memimpin, menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan dan penyusunan program dinas;
- b) Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan;
- c) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan di lingkungan dinas;
- d) Mewaki kepala dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat;
- e) Mengkoordinasikan dan mengarahkan sub bagian-sub bagian;

- f) Mengkoordinasikan, mengarahkan, membina. dan merumuskan pendoman dan petunjuk adminitrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah taggga di lingkungan dinas;
- g) Mengkoordinasikan, dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
- h) Mengkoordinasikan, membina, merumuskan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggung jawaban dinas;
- i) Mengkoordinasikan, membina, pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
- j) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- k) Mengevaluasi tugas secretariat berdasarkan informasi, data,laporan yang di terima untuk bahan menyepurna lebih lanjut.
- l) Melaporkan pelaksanaan tugas secretariat kepada atasan secara lisan maupun tulisan.
- m) Mengevaluasi tugas sekretariat tugas dengann cara konsultasi, bimbingan krja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
- n) Mengevaluasi tugas sekretariat berdsarkan informasi, data laporan yang diterimah untuk bahan laporan lebih lanjut.
- o) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Fungsi:

- a) Tugas lain penyusunan program kerja dinas;
- b) Penyelenggaraan pelayanan adaminitrasi, keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan umum dan rumah tangga;
- c) Pelaksanaan koordinasi pelayanan adminitrasi dinas;
- d) Pengkoordinasian rapat dinas dan keprotokolan;
- e) Pengkoordinasian laporan tahunan;
- f) Pengkoordinasian kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor
- g) Pelaksanaan tugas

C. Sekretaris terdiri dari:

- a) Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan
- b) Sub Bagian Keuangan
- c) Sub Bagian Penyusunan Program

Kemudian Kepala Dinas dan Pemakaman dalam melaksanakan tugasnya dibantu 4 bidang yang mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing dalam

menjamin terlaksanya pemberdayaan sosial masyarakat, yang bidang-bidang tersebut terdiri dari:

1. Bidang pelayanan dan pemberdayaan sosial, terdiri dari:
 - a) Seksi Kesejahteraan Anak, Keluarga, dan Lanjut Usia
 - b) Seksi Pemberdayaan Keluarga Miskin
 - c) Seksi Lembaga Sosial dan Penyuluhan Sosial
2. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:
 - a) Seksi Rehabilitasi Anak Nakal, Eks Koerban NAPZA dan Eks Hukuman
 - b) Seksi Rehabilitasi dan Pemberdayaan Penyandang cacat
 - c) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial
3. Bidang bantuan sosial, terdiri dari:
 - a) Seksi bantuan sosial dan korban bencana
 - b) Seksi hak asasi manusia, pahlawan dan perintis kemerdekaan.
 - c) Seksi pengendalian, pengawasan dan pengumpulan sosial.
4. Bidang Pemakaman, terdiri dari;
 - a) Pengawasan dan seksi registrasi peniapan lahan dan perlengkapan
 - b) Seksi pemeliharaan dan pemanfaatan pemakaman
 - c) Seksi pengendalian pemakaman.

Dalam melaksanakan tugas program Elektronik Warong gotong royong kelompo usaha bersama program keluarga harapan (E- Warong KUBE PKH) pembinaan merupakan tugas pada bidang Pemberdayaan Sosial bersama seksi Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin, tugas dan fungsi bidang Pemberdayaan Sosial adalah :

1. Bidang Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pembinaan dan pengendalian serta pelayanan kesejahteraan sosial dibidang kesejahteraan anak, keluarga, lanjut usia, dan jompo, bimbingan keluarga miskin,

pemberdayaan lembaga-lembaga sosial termasuk pengawasan terhadap panti sosial, penyuluhan sosial serta jaminan sosial.

- b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan bimbingan teknis dan pengendalian program pelayanan sosial dan pemberdayaan social.
- c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan inventarisasi data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi serta sumber-sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dibidang tugasnya
- d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan kegiatan penyuluhan, bimbingan sosial dan pengembangan swadaya masyarakat dibidang kesejahteraan sosial.
- e. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kerjasama dengan unit kerja lain serta instansi terkait sesuai bidang tugasnya
- f. Menkoordinasikan, membina, menyusun laporan dan hasil- hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugasnya
- g. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Bidang Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud juga menyelenggarakan fungsi

- a. Penyusunan program kerja

- b. Pembinaan dan perumusan bimbingan teknis dan pengendalian program pelayanan sosial dan pemberdayaan sosial
 - c. Pengkoordinasian inventaris data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
 - d. Pengumpulan bahan kegiatan penyuluhan
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain
3. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin masalah Kesejahteraan sosial menyelenggarakan fungsi ;
- a. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan pemberdayaan Fakir Miskin
 - b. Penyiapan bahan pemberian teknis dibidang pemberdayaan Fakir Miskin dalam masalah kesejahteraan sosial
 - c. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penerapan kebijakan dibidang pemberdayaan dan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial
 - d. Penyiapan bahan penetapan Kebijakan tentang fakir Miskin
 - e. Penyiapan bahan kerjasama pemerintah dan kerjasama non pemerintah dalam penanganan fakir miskin
 - f. Penyiapan bahan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi pemberdayaan Fakir miskin
 - g. Penyiapan bahan Pengajuan usula dan rekomendasi untuk menetapkan akreditas dan sertifikasi pemberdayaan dan pengembangan Fakir miskin
 - h. Penyiapan bahan pelaksanaan program pemberdayaan dan pengembangan Fakir Miskin

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian yang mengangkat permasalahan Efektivitas program warong gotong royong keluarga usaha bersama dan program keluarga harapan (E-Warong KUBE PKH) oleh Dinas Sosial dan Pemukiman Pekanbaru, maka dari itu untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian, peneliti mengambil data melalui instrument penelitian yaitu Kuesioner, Wawancara dan Obsevasi yang di lakukan melalui pengisian kuesioner oleh responden penelitian dan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin serta tinjauan peneliti pada lokasi penelitian dengan melihat kegiatan yang sedang atau telah berlalu, yang mana kesemuanya di butuhkan dalam hal mengambil kesimpulan penelitian. Adapun data yang peneliti dapatkan dari responden penelitian yaitu akan di dapatkan sebagai berikut :

A. Identitas Responden

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam pelaksanaan penelitian terhadap seluruh responden yang digunakan sebagai sampel, maka pada bab ini akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas responden dan hasil jawaban yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner serta wawancara dan observasi yang akan dijelaskan pada bab ini.

Identitas responden penelitian ini sebagai salah satu cara untuk menginformasikan gambaran responden secara umum seperti tingkatan pendidikan,

umum dan jenis kelamin Identitas responden berguna untuk mengetahui beberapa banyak responden, jenis kelamin, usia dan pendidikan, hal ini penting untuk menggambarkan bagaimana kondidi responden yang terdapat dalam penelitian ini sehingga dapat lebih memperjelas mengenai hasil penelitian. Untuk jelasnya identitas responden pegawai Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.1. Distribusi Jenis Kelamin Responden Pegawai Kntor Dinas Sosial dan Pemakaman Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Kelamin	Populasi	Persentase
1	Pria	10	70%
2	Wanita	4	30%
Jumlah		14	100%

Sumber : Data Penelitian, 2020

Dari data V. 1 diatas terlihat bahwa dalam penelitian ini responden lebih banyak di dominasi oleh laki-laki yaitu berjumlah 18 orang atau 70% dan wanita yang berjumlah 4 atau 30%. Untuk selanjutnya pengelompokkan responden penelitian berdasarkan umur atau usia dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.2. Distribusi Responden Pegawai Kantor Dinas Sosial dan pemakaman Berdasarkan Usia .

No.	Usia	Populasi	Persentase
1	< 30 tahun	5	41%
2	30-39 tahun	6	27%
3	40-49 tahun	2	23%
4	>50 tahun	1	9%
Jumlah		14	100%

Sumber: Data penelitian, 2020

Dari data di atas terlihat bahwa pada responden penelitian ini didominasi oleh tingkatan pendidikan. Sekolah menengah atas atau SMK, berjumlah 12 orang atau 54%, sehingga jika dilihat dari tingkatan pendidikan responden penelitian dalam katagori memadai.

B. Hasil dan Pembahasan

Setelah menyebarkan angket (kuesioner) kepada responden penelitian yang terdiri pegawai Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, maka selanjutnya setelah angket tersebut diisi oleh responden selanjutnya peneliti mengolah data tersebut, melakukan pengelompokan data berdasarkan indikator dan item penilaian masing-masing serta akan dijelaskan berurutan perindikator dan masing-masing pembagian responden penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Ketepatan Sasaran Program

Menurut Sugiyono (2005:21) ketepatan program adalah sebuah rangkaian instruksi yang menggunakan bahasa komputer yang di susun secara logis dan sistematis. Program yang telah dilaksanakan harus ditujukan kepada sasaran yang tepat sesuai dengan kriteria peserta Program yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan Program dapat berjalan dengan efektif. Kesesuaian antara tujuan Program dan sasaran peserta Program mempengaruhi keberhasilan Program. Setelah dilakukan penyebaran Koesioner dan pengumpulan serta pengolahan data maka ditetapkan jawaban responden penelitian seperti yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.3 : Distribusi jawaban responden Dinas Sosial dan Pemukiman Kota Pekanbaru mengenai Ketepatan Sasaran Program

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Sasaran Program sesuai dengan yang sudah di tentukan	12	2	-	14
2	Peserta program yang sesuai dengan kriteria	13	1	-	14
Jumlah		25	3	-	28
Rata-Rata		13	1	-	14
Persentase		90%	10%	-	100%

Sumber: Data Olahan 2020

Dari tabel diatas dapat kita ketahui hasil jawaban responden Dinas Sosial Kota pekanbaru untuk indikator pertanyaan Ketepatan Sasaran Program dalam Efektivitas program Elektronik warong Kelompok usaha bersama program keluarga harapan pada indikator pertanyaan pertama terkait sasaran program sesuai dengan yang sudah di tentukan 12 dari 14 orang mengatakan Baik dan 2 orang mengatakan kurang Baik, dan untuk indikaor pertanyaan yang kedua tentang Peserta program yang sesuai dengan kriteria yaitu 13 dari 14 orang mengatakan Baik dan hanya satu orang yang mengatakan kurang Baik.

Sesuai dengan Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota Peanbaru ada tanggal 15 Januari 2020 , mengatakan :

“ Kami selaku instansi penyelenggara program E warong KUBE PKH di kota pekanbaru sudah menjalankan program sesuai aturan yang telah di tentukan dan program ini telah tepat sasaran di peruntukan untuk peserta atau keluarga kurang mampu “

Dari hasil Observasi yang di lakukan ke beberapa titik lokasi peneliti melihat program ini berjalan sudah tepat akan sasaran untuk beberapa wilayah ketika sudah tepat akan sasaran maka secara otomatis kriteria peserta penerima program ini juga sudah tepat dengan beberapa kriteria penerima program ini seperti salah satunya , memiliki kartu keluarga sejahtera, dan/atau penerima manfaat Bantuan Sosial lainnya, dalam hal ini ketepatan sasaran dinilai dari ketepatan akan peserta yang menerima program ini.

Tabel V.4 : Distribusi jawaban responden Anggota PKH untuk wilayah kecamatan di Pekanbaru mengenai Ketepatan Sasaran Program

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Sasaran Program sesuai dengan yang sudah di tentukan	10	15	5	30
2	Peserta program yang sesuai dengan kriteria	10	20	-	30
Jumlah		20	35	5	60
Rata-Rata		10	18	2	30
Persentase		30%	60%	10%	100%

Sumber: Data Olahan 2020

Dapat di ketahui dari tabel V.4 di atas berdasarkan hasil jawaban responden anggota PKH untuk wilayah kecamatan di kota pekanbaru tentang indikator Ketepatan Sasaran Program dalam Efektivitas program Elektronik warong Kelompok usaha bersama program keluarga harapan pada pertanyaan pertama 10 dari 30 orang mengatakan hal ini sudah Baik kemudian 15 orang mengatakan kurang Baik dan

sisanya 5 orang mengatakan tidak Baik hal ini dilihat dari sisi adanya perubahan yang tidak tersampaikan terkait dengan pengambilan jumlah barang yang berkurang.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan salah satu peserta Kelompok usaha bersama program keluarga bersama pada tanggal 17 Januari 2020 , mengatakan ;

“ Memang benar adanya perubahan ketetapan yang tidak di sosialisasikan sebelumnya terkait pengambilan barang yang jumlahnya berkurang , yang seharusnya di sosialisasikan terlebih dahulu kepada pemilik E warong”

Berdasarkan Hasil Observasi peneliti dilapangan terkait tepat sasaran program ini peserta mengeluh akan adanya perubahan jumlah barang yang bisa di ambil tanpa adanya sosialisasi sebelumnya mereka menilai tepat sasaran ketika program ini berjalan sesuai dengan tetapan yang telah di buat sebelumnya jika ada perubahan harus di sosialisasikan terlebih dahulu.

2. Sosialisasi Program

Menurut Soerjono Soekanto (2006:29) Sosialisasi Program adalah proses sosial tempat seseorang atau kelompok mendapatkan pembentukan karakter dan pemahaman informasi mengenai pelaksanaan Program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta Program pada khususnya. Dilihat dari adanya kesesuaian sasaran Program dengan tujuan yang telah ditentukan. Program yang telah dilaksanakan harus ditunjukkan kepada sasaran yang kongkret, sehingga proses pelaksanaan Program dapat berjalan dengan efektif. Hal ini dapat dilihat dari tabel distribusi dibawah ini.

Tabel V.5 : Distribusi jawaban responden Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengenai Sosialisasi Program

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Adanya Sosialisasi	12	2	-	14
2	Kesesuaian program dengan tujuan	13	1	-	14
Jumlah		25	3	-	28
Rata-Rata		13	1	-	14
Persentase		90%	10%	-	100%

Sumber: Data Olahan 2020

Dapat kita ketahui dari tabel V.5 diatas di atas berdasarkan hasil jawaban responden Dinas Sosial Kota Pekbaru tentang indikator Sosialisasi Program dalam Efektivitas program Elektronik warong Kelompok usaha bersama program keluarga harapan pada pertanyaan pertama terkait adanya Sosialisasi 12 dari 14 orang responden mengataka Baik dan hanya 2 orang yang mengatatakan Kurang Baik dalam pertanyaan tentang adanya sosialisasi, kemudian pada indikator pertanyaan kedua tentang Kesesuaian Program dengan tujuan 13 dari 14 orang responden dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengatakan efektif dan hanya 1 orang yang mengatakan kurang Baik.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota pekanbaru pada tanggal 15 Januari 2020 :

“Menjalankan program ini kami sebelumnya sudah mensosialisasikan kepada masyarkat khususnya penerima bantuan sosial dan yang tergabung dalam KUBE PKH yang bertujuan pogram ini berjalan sesuai dengan tujuan “

Berdasarkan Hasil Observasi penulis dilapangan bahwa benar Dinas Sosial Kota Pekanbaru ada melakukan beberapa kegiatan sosialisasi yang bertujuan memberikan informasi terkait program pemerintah yang dijalankan dan juga tujuan dari program ini yang sangat bermanfaat bagi masyarakat kurang mampu dan penerima bantuan sosial.

Tabel V.6 : Distribusi jawaban responden Kelompok PKH wilayah Kecamatan di Kota Pekanbaru mengenai Sosialisasi Program

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Adanya Sosialisasi	6	15	9	30
2	Kesesuaian program dengan tujuan	10	20	-	30
Jumlah		16	35	9	60
Rata-Rata		8	18	4	30
Persentase		30	60	10	100%

Sumber: Data Olahan 2020

Dapat dilihat dari tabel V.6 di atas hasil jawaban responden Kelompok PKH wilayah Kecamatan di Kota Pekanbaru terkait indikator pertanyaan Sosialisasi 6 dari 30 orang mengatakan baik dan 15 Orang mengatakan Cukup Baik dan sisanya 9 orang mengatakan Tidak Baik kemudian untuk pertanyaan kedua terkait dengan Kesesuaian program dengan tujuan yaitu 10 dari 30 orang mengatakan Baik dan 20 orang mengatakan Cukup baik ,dan secara keseluruhan dari jawaban responden terkait dengan indikator sosialisasi program dapat di katanya Cukup baik dengan persentase 60%.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan salah satu peserta Kelompok usaha bersama program keluarga bersama pada tanggal 17 Januari 2020 , mengatakan ;

“ Dinas sosial kota pekanbaru memang telah mensosialisasikan terkait program E arong yang di jalankan ini tetapi yang kami sayangkan terkait dengan pengurangan jumlah barang yang bisa di ambil di E warong berkurang hal ini tidak di beritahukan sebelumnya atau di sosialisasikan terlebih dahulu kepada anggota PKH dan pemilik E warong”

Berdasarkan Hasil Observasi Peneliti memang benar sebelumnya pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah mensosialisasikan terkait Program E warong ini namun setelah berjalannya program ini dan untuk pengambilan barang Di E warong berkurang tidak seperti jumlah yang sebelumnya hal ini tidak ada pemberitahuan sebelumnya oleh pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

3. Tujuan Program

Menurut LeBoeuf (2010:23) Tujuan adalah sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan Program dengan tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya. Dalam hal ini pelaksanaan sebuah Program harus mampu termanifestasikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga keefektifan suatu Program dapat diukur dengan tujuan Program yang telah ditetapkan.

Tabel V.7 : Distribusi jawaban responden Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengenai Tujuan Program

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Kejelasan Tujuan Program E Warong	12	2	-	14
2	Penjelasan Manfaat dari Program ini	14	-	-	14
Jumlah		26	2	-	28
Rata-Rata		13	1	-	14
Persentase		90%	10%	-	100%

Sumber: Data Olahan 2020

Dapat di lihat dari tabel V.7 diatas terkait distribusi jawaban responden Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengenai indikator pertanyaan tujuan Program diketahui pada pertanyaan pertama tentang Kejelasan Tujuan dari Program E warong ini bahwa 12 dari 14 orang mengatakan Baik dan 2 orang yang mengatakan Cukup Baik kemudian untuk pertanyaan kedua tentang Penjelasan tentang Manfaat dari program ini sendiri diketahui 14 dari 14 orang responden mengatakan Baik, dan secara keseluruhan jawaban responden Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengenai indikator Tujuan Program ini dapat di katakan baik dengan persentase 90%.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota pekanbaru pada tanggal 15 Januari 2020 :

“Dalam proses Sosialiasi kepada kelompok-kelompok PKH di kota pekanbaru ini kami sudah menyampaikan Tujuan serta manfaat dari Program E warong yang kami jalan kan ini“

Tabel V.8 : Distribusi jawaban responden Kelompok PKH di wilayah Kecamatan di Kota Pekanbaru mengenai Tujuan Program

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Kejelasan Tujuan Program E Warong	10	16	4	30
2	Penjelasan Manfaat dari Program ini	14	16	-	30
Jumlah		24	32	4	52
Rata-Rata		12	16	2	30
Persentase		40	60	10	100%

Sumber: Data Olahan 2020

Dapat diketahui dari tabel V.8 Distribusi jawaban responden Kelompok PKH di Wilayah Kecamatan di Kota Pekanbaru mengenai indikator Tujuan Program pada pertanyaan pertama tentang Kejelasan Tujuan Program E warong ini 10 dari 30 orang responden mengatakan Baik dan 16 Orang Mengatakan Cukup baik serta 4 Orang mengatakan Tidak baik, Kemudian pada pertanyaan kedua tentang Penjelasan Manfaat dari Program ini diketahui 14 dari 30 orang mengatakan Baik dan sisanya 16 orang mengatakan Cukup baik dan secara keseluruhan jawaban responden Kelompok PKH di wilayah Kecamatan di Kota Pekanbaru ini masuk dalam kategori Cukup baik dengan persentase tertinggi yaitu 60%.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan salah satu peserta Kelompok usaha bersama program keluarga bersama pada tanggal 17 Januari 2020 , mengatakan ;

"Memang benar Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah menjelaskan Tujuan dan Manfaat dari program E warong ni yang di sampaikan di saat Sosialisasi yang di berikan sebelumnya tetapi dalam pelaksanaannya masih ada masalah seperti

lambatnya pencairan dana dan berkurangnya jumlah barang yang bisa diambil yang kami anggap tidak seperti tujuan awal”

4. Pemantauan Program

Menurut Dipohusodo (1996:59).Pemantauan Program adalah upaya mengamati berupa evaluasi yang dapat di ukur dengan sejauh mana suatu Program memberikan efek atau dampak terhadap perubahan yang nyata bagi masyarakat peserat Program serat pelaksanaan Program harus sesuai dengan waktu dan tujuannya.

Tabel V.9 : Distribusi jawaban responden Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengenai Indikator Pemantauan Program

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Adanya Pemantauan Program	10	4	-	14
2	Adanya Evaluasi	8	6	-	14
Jumlah		18	10	-	28
Rata-Rata		9	5	-	14
Persentase		60%	40%	-	100%

Sumber: Data Olahan 2020

Dapat diketahui dari tabel V.9 diatas terkait Distribusi jawaban responden Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengena Indikator Pemantauan Program pada pertanyaan pertama tentang Adanya Pemantauan Program E Warong ini 10 dari 14 Orang yang mengatakan Baik dan sisanya 4 Orang mengatakan Cukup Baik ,Kemudian untuk pertanyaan kedua tentang Adanya Evaluasi terkait Program E Warong ini 8 dari 14 orang mengatakan Baik dan 6 orang mengatakan Cukup baik dan secara keseluruhan untuk jawaban responden Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengenai Indikator pertanyaan

Pemantauan program ini dapat di katakan Baik dengan persentase paling tinggi yaitu 60%.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota pekanbaru pada tanggal 15 Januari 2020 :

“Kami selaku instansi penyelenggara Program E warong ini kami juga melakukan pemantauan yang berguna untuk mengetahui perkembangan dari program ini dan setiap perkembangan akan ada evaluasi yang bertujuan agar program ini akan lebih baikkedepannya dan tercapai tujuan dari Program E waring ini“

Berdasarkan Hasil Observasi yang dilakukan oleh Peneliti , peneliti menilai Dinas Sosial Kota pekanbaru memang ada melakukan pemantauan walaupun tidak secara rutin namun untuk Evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru peneliti belum melihat bentuk Evaluasi tersebut.

Tabel V.10 : Distribusi jawaban responden Kelompok PKH di wilayah Kecamatan di Kota Pekanbaru mengenai Indikator Pemantauan Program

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Adanya Pemantauan Program	10	15	5	30
2	Adanya Evaluasi	5	20	5	30
Jumlah		15	35	10	60
Rata-Rata		7	18	5	30
Persentase		20%	60%	20%	100%

Sumber: Data Olahan 2020

Dapat diketahui dari Tabel V.10 di atas bahwa Distribusi Jawaban responden Kelompok PKH di wilayah Kecamatan di Kota Pekanbaru pada Pertanyaan pertama terkait Adanya Pemantauan dari Program E Warong yang dijalankan ini 10 dari 30 orang mengatakan Baik,kemudian 15 Orang mengatakan Cukup Baik dan 5 orang mengatakan Tidak Baik. Setelah itu pada Pertanyaan Kedua terkait dengan adanya

Evaluasi yang dilakukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menjalankan Program E Warong ini, diketahui 5 dari 30 orang yang mengatakan Baik dan 20 Orang mengatakan Cukup Baik kemudian 5 Orang mengatakan Tidak Baik. Dan secara Keseluruhan dapat diketahui pada Indikator pertanyaan tentang Pemantauan Program ini dapat di Kategorikan Cukup baik dengan persentase 60%.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan salah satu peserta Kelompok usaha bersama program keluarga bersama pada tanggal 17 Januari 2020 , mengatakan ;

”Memang benar Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah menjelaskan Tujuan dan Manfaat dari program E warong ni yang di sampaikan di saat Sosialisasi yang di berikan sebelumnya tetapi dalam pelaksanaannya masih ada masalah seperti lambatnya pencairan dana dan berkurangnya jumlah barang yang bisa diambil yang kami anggap tidak seperti tujuan awal”

Berdasarkan hasil Observasi Peneliti kelapangan dan diketahui Pemantauan Program E warong yang di jalankan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru ini memang ada namun tidak secara rutin dan Evaluasi harus ada dikarenakan Pihak kelompok mulai mempertanyakan hal pengurangan jumlah barang yang bisa di ambil dan sarana pendukung baiknya yang ada masalah seperti lambatnya proses pencairan dana.

Selanjutnya dari Empat Indikator yang telah diuraikan diatas mengenai Efektivitas E Warong PKH di Kota Pekanbaru disajikan dalam Tabel Rekapitulasi Penilaian terhadap jawaban responden.

Tabel V.11 : Rekapitulasi Jawaban Responden dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Ketepatan sasaran Program	13	1	-	14
2	Sosialisasi Program	13	1	-	14
3	Tujuan Program	13	1	-	14
4	Pemantaua Program	9	5	-	14
Jumlah		48	8	-	56
Rata-Rata		12	2	-	14
Persentase		85%	15%	-	100%

Sumber: Data Olahan 2020

Sesuai dengan tabel V.11 tersebut dapat diketahui Penilaian Jawaban responden dari Dinas Sosial Kota pekanbaru terhadap 4 indikator pertanyaan mengenai Efektifitas Program Elektronik Warong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan daat di kategorikan Baik atau Efektif ,karena 12 dari 14 orang responden atau 85% dari total Responden mengatakan Baik, sesuai dengan teknik penilaian yang telah di buat , Maka 85% berada di interval 66%-100%, maka hasil rekapitulasi berdasarkan jawaban dari Responden Dinas Sosial Kota Pekanbaru dinyatakan Efektif.

Sedangkan dilihat dari Rekapitulasi penilaian secara keseluruhan Responden Kelompok PKH di wilayah Kecamatan di Kota Pekanbaru sesuai dengan tabel berikut:

Tabel V.12 : Rekapitulasi Jawaban Responden dari Kelompok PKH di wilayah Kecamatan di Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Ketepatan sasaran Program	10	18	2	30
2	Sosialisasi Program	8	18	4	30
3	Tujuan Program	12	16	2	30
4	Pemantaua Program	7	18	5	30
Jumlah		37	70	13	120
Rata-Rata		9	18	3	30
Persentase		30%	60%	10%	100%

Sumber: Data Olahan 2020

Dari tabel V.12 diatas hasil Rekapitulasi Jawaban responden Kelompok PKH di wilayah Kecamatan di Kota Pekanbaru ini tentang Efektifitas Program Elektronik Warong Kelompok Usaha bersama Program Keluarga Harapan di Kota Pekanbaru dapat di Kategorikan “Kurang Baik atau Kurang Efektif “ karena rata rata 30 orang responden yang mengatakan Kurang Baik yaitu sebanyak 18 orang dengan Persentase 60% ini berada pada interval antara 33%-66% dengan Kategori Kurang Baik.

Selanjutnya dapat dilihat dari Rekapitulasi Penilaian secara Keseluruhan mengenai Efektifitas Program Elektronik Warong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga harapan di Kota Pekanbaru dapat di simpulkan yakni :

Sesuai dengan Data pada Tabel V.11 dan V.12 di atas dapat di katakan penilaian terhadap jawaban tentang Efektifitas Program Elektronik Warong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan di Kota Pekanbaru Dapat dikategorikan Kurang Efektif dikarenakan berdasarkan hasil oberservasi peneliti di lapangan masih ada beberapa permasalahan seperti kurangnya pengawasan yang

dilakukan oleh pihak Dinas sosial terkait dengan program yang dijalankan, kemudian evaluasi yang kurang dilakukan juga terhadap program yang dijalankan seperti masalah pencairan dana lama dan Dengan Demikian Program Efektifitas Elektronik Warong Kelompok Usaha Bersama Program keluarga harapan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru tahun 2018 masuk dalam ketegri Kurang Baik.

C. Faktor-Faktor Penghambat dalam Efektifitas Program Elektronik Warong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan di Kota Pekanbaru

Berdasarkan Hasil pengamatan secara langsung dilapangan dan hasil wawancara Bersama Kepala Bidang Pemberdayaa Sosial, Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin, Pendamping Sosial PKH Kecamatan, serta Anggota PKH Wilayah Kecamatan di Kota Pekanbaru. Diketahui beberapa Hambatan yang diperoleh dalam Efektifitas Program Elektronik Warong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan di Kota Pekanbaru, adapun Hambatan yang dihadapi, adalah :

1. Kurangnya Pemantauan Program E warong yang di jalankan ini yang bertujuan agar mengetahui perkembangan yang terjadi dalam Program ini
2. Evaluasi yang kurang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk mengatasi masalah lamanya pencairan Dana serta pengurangan jumlah barang yang bisa di ambil.
3. Kurang Sarana dalam pelaksanaan Program ini seperti Jaringan yang terkadang sulit sehinga Keluarga Penerima bantuan sosial ini tidak bisa berbelanja.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Diketahui bahwa Efektifitas Program Elektronik Warong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan di Kota Pekanbaru dapat di Kategorikan Kurang Efektif. Ini dapat dilihat dari jawaban responden dari 4 indikator terkait, yaitu Ketepatan sasaran program, Sosialisas Program, Tujuan Program dan Pemantauan Program, yang paling menonjol dari ke empat Indikator pertanyaan tersebut yaitu pada Indikator Sosialisasi Program , karena Sosialisasi yang kurang di lakuka oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru terhadap Program E warong yang di jalankan ini sehingga ketik ada perubahan dalam program ini tanpa di sosialisasikan terlebih dahulu membuat Kelompok PKH yang menerima bantuan sosial non tunai ini merasa tidak puas.
2. Diketahui bahwa beberapa hambatan yang di hadapi dalam Pelaksanaan Program ini Yaitu :
 - a. Kurangnya Pemantauan Program E warong yang di jalankan ini yang bertujuan agar mengetahui perkembangan yang terjadi dalam Program ini

- b. Evaluasi yang kurang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk mengatasi masalah lamanya pencairan Dana serta pengurangan jumlah barang yang bisa di ambil.
- c. Kurang Sarana dalam pelaksanaan Program ini seperti Jaringan yang terkadang sulit sehingga Keluarga Penerima bantuan sosial ini tidak bisa berbelanja.

B. Saran

1. Kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru disarankan harus lebih sering melakukan pemantauan program yang di jalankan sehingga ketika ada masalah cepat tanggap dalam menyelesaikannya
2. Kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru Diharapkan Evaluasi harus segera di lakukan terkait lamanya pencairan dana dan Jumlah barang yang seketika berkurang saat ingin di ambil.
3. Kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru terkait Sarana dalam Pelaksanaan Program E Warong ini harus di perbaiki terkait dengan jaringan yang sering bermasalah yang menghambat proses pengambilan barang di E Warong.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-Buku

- Aggung Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka
- Dunn, William N. 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Gajah Mada University Press, Jogjakarta.
- Effendy, Onong Uchjana. 2008. *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Gronlund, Ake. 2007. “*Electronic Government*”. pada: Anttiroiko, Ari-Veiko and Matti Malkia (eds.), *Encyclopedia of Digital Government*, Volume I, Hershey: Idea Group Reference.
- Holmes, Douglas. 2001. *E-Gov: e-Business Strategies for Government*. London.
- Koryati, Nyimas Dwi. 2005. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta: Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia.
- Leo Agustino. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Margono. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Renika Cipta
- Muhadam Labolo. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga
- Ndraha, Taliziduhu, 2005. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nugroho. Riant. Dr. 2009. *Public Policy*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo
- Prawirosentono, Suyadi. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPFE
- Rasyid, M. Ryaas. 2002. *Makna Pemerintahan*. Jakarta : Yarsif Watampone.

- Rasyid, M. Ryaas. 1997, *Makna Pemerintahan Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Yarsif Watampone
- Richardus Eko Indrajit. 2002. *Electronic government: strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digita*. Yogyakarta: Andi Offset
- Sedarmayanti, 2004. *Pengembangan Kepribadian Pegawai*. Bandung: Mandar Maju
- Sugiyono. 2013. *Metode penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Syafi'I, Inu Kencana, dkk. 2004. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka cipta
- Sondang P. Siagian. 1994. *Organisasi, Kepemimpinan, Perilaku Administrasi*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung
- Susanto R. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Tanah*. Yogyakarta: Kanisius
- Soewarno Handayaniingrat. 1994. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Jurnal-Jurnal

- Indira Putri Pramesti. (2017). Implementasi Program E-Warong KUBE Srikandi di Kota Malang Tahun 2017. (Studi Di Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen)
- Mavita Anarizka, Nina Widowati. (2017). Akuntabilitas Pelaksanaan Program Elektronik Warong Gotong Royong (E-Warong) Di Kecamatan Banyumanik
- Monica Pertiwi, Herbasuki Nurcahyanto. (2017). Efektivitas Program Bpjs Kesehatan Di Kota Semarang (Studi Kasus pada Pasien Pengguna Jasa BPJS Kesehatan di Puskesmas Srandol) Universitas Diponegoro.
- Risnandar dan Aditya Wisnu Broto (2017), Implementasi Program Bantuan Sosial Non Tunai Di Indonesia

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai;

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah

Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warong Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan

Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 150/HUK/2016 tentang Penetapan Wilayah Kerja Penanganan Fakir Miskin